PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS GREEN ECONOMY

(Studi pada Dinas Pertanian Kota Kediri)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NOVY FARADELLA BUKHORIDA 115030107111037



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2015

MOTTO

Keep your hopes up high,
and your head down low.

(A day to remember - All I want)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pertanian

Berbasis Green Economy (Studi pada Dinas Pertanian Kota

Kediri)

Disusun Oleh : Novy Faradella Bukhorida

NIM : 115030107111037

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Ketua

Malang, Desember 2014

Komisi Pembimbing

Dr. Mochamad Saleh Soeaidy, MA

NIP. 19540212 198103 1 006

Drs. Suwondo, MS

Anggota

NIP 19530201 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Januari 2015 Jam : 11.00 - 12.00

Skripsi atas nama : Novy Faradella Bukhorida

Judul : Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan

Pertanian Berbasis Green Economy (Studi pada Dinas

Pertanian Kota Kediri)

Dan dinyatakan lulus.

MAJELIS PENGUJI

Dr. Mochamad Saleh Soeaidy, MA

Ketua,

NIP. 19540212 198103 1 006

Drs. Suwondo, MS

Anggota,

Anggota,

NIP.19530201198010 1 001

Anggota,

Dr. Bambang Santoso Haryono, MS

NIP. 19610204 198601 1 001

Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP

NIP. 19531113 198212 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Januari 2015

Novy Faradella Bukhorida 115030107111037



RINGKASAN

Novy Faradella Bukhorida, 2011. (**Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pertanian Berbasis** *Green Economy*) Dr. Mochamad Saleh Soeaidy, MA. Drs. Suwondo, MS., 126 Hal + XIX

Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai negara dengan sektor agrarisnya yang luas dan memiliki peran penting dalam perekonomian dan sejarah yang panjang. Hal ini disebabkan karena Indonesia di dukung oleh potensi dan sumber daya alam yang cocok untuk pengembangan bidang pertanian seperti iklim tropis yang mendukung tanaman untuk tumbuh subur. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan erat kaitannya dalam menjalankan *green economy*, dimana dalam konteks pembangunan ekonomi maka bukan hanya kemajuan fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan tetapi juga aspek keberlanjutan ekologis. Konsep dari *green economy* untuk pertanian bukan hanya sekedar proses untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran, tetapi juga membawa misi besar, yaitu menyadarkan manusia agar perduli dengan lingkungan. Peranan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat terutama petani menjadi sadar bahwa menjaga kelestarian alam dalam proses pembangunan pertanian sangat penting karena alam tempat kita tinggal dan tempat kita hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian Kota Kediri dalam pembangunan pertanian dan bagaimana pembangunan pertanian berbasis *green economy* di Kota Kediri, sehingga disini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pertanian Berbasis *Green Economy*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Peranan Pemerintah dalam pembangunan pertanian berbasis *green economy* memang sudah baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008, meskipun masih adanya faktor yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terutama petani dalam menjaga kelestarian alam pasca produksi pertanian.

Saran dari peneliti adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya petani maka Dinas Pertanian Kota Kediri harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan pertanian berbasis *green economy* melalui sistem pertanian organik. Karena pertanian organik menjamin keberlanjutan bagi agroekosistem dan kehidupan petani sebagai pelaku pertanian.

SUMMARY

Novy Faradella Bukhorida, 2011. (The Role of Local Government in the Agricultural Development Based on Green Economy) Dr. Mochamad Saleh Soeaidy, MA. Drs. Suwondo, MS., 126 Hal + XIX

Indonesia has long been known as a country with vast agricultural sector and have an important role in the economy and a long history. This is because Indonesia is supported by the potential and natural resources suitable for the development of agriculture such as tropical climate that supports the plant to thrive. Agriculture's contribution to development is closely related to the running of green economy, which in the context of economic development it is not only the physical and social progress are taken into account, but also aspects of ecological sustainability. The concept of green economy for agriculture is not just a process to save the earth from destruction, but also bring great mission, that of calling people to care about the environment. The role of the Department of Agriculture Kediri in this case is needed so that people especially farmers became aware that the preservation of nature in the process of agricultural development is very important because the nature is a place we live and where we live.

This study aims to determine, describe and analyze how the role of local government that is the Department of Agriculture Kediri in agricultural development and how agricultural development based green economy in Kediri, so here the authors are interested to know more clearly about the Role of Local Government in Agricultural Development Based Green Economy. In this study, researcher used a qualitative research with descriptive approach and use methods of analysis by Miles and Huberman.

Based on the research that has been done, the Government 's role in agricultural development based on the green economy is already good and effective in accordance with Regulation of the Mayor of Kediri number 60 of 2008, although there is still a barrier factor, namely the lack of public awareness especially farmers in conserving the nature of post-production agriculture.

Suggestions of the researcher is to increase public awareness especially farmers, so the Agriculture Department Kediri should be more active in disseminating agricultural based green economy through organic farming systems. Because organic farming will ensure the sustainability of agro-ecosystem and the lives of farmers as agriculturalists.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Penulis ucapkan terimakasih kepada :

- 1. Ibu, Ayah, kedua adik-adikku tersayang, nenek dan kakek yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta pengorbanan dalam bentuk apapun untuk selalu memberikan yang terbaik.
- 2. Fitra Anugrawan, yang selalu bersedia mendengar keluh kesah dan memberi semangat yang tidak pernah putus dalam penyelesaian skripsi ini.
- 3. Sahabat terbaikku Annisa, Lendy, Ella, Elok, Eli dan semuanya yang tidak dapat dituliskan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesian skripsi ini.
- 4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Anda semua.

Terima Kasih banyak, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Malang, Desember 2014

Penulis Novy Faradella Bukhorida



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pertanian Berbasis *Green Economy* (Studi pada Dinas Pertanian Kota Kediri)". Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Adinistrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak Choirul Saleh, Dr, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
- 3. Bapak Dr. Mochamad Saleh Soeaidy, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada penulis guna penyelesaian karya tulis skripsi ini
- 4. Bapak Drs. Suwondo, MS selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, arahan, nasehat, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tahapan skripsi ini.

- 5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.
- Bapak Ir. Haris Candra Purnama, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri.
- 7. Ibu Sri Winarsih, SP, MMA selaku Pokja penyusunan Programa dan Kelembagaan
- 8. Seluruh Staff Dinas Pertanian Kota Kediri atas segala bimbingan dan informasi yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Bapak dan Ibu petani Kota Kediri yang telah memberikan informasi terkait pertanian di Kota Kediri

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik namun apabila masih kurang sempurna, dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, Desember 2014

Penulis



DAFTAR ISI

		Halaman
MOTTO		i
	PERSETUJUAN SKRIPSI	
	PENGESAHAN SKRIPSI	
	TAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKA	SAN	v
SUMMA	RYR PESEMBAHANENGANTAR	vi
LEMBAI	R PESEMBAHAN	vii
KATA PI	ENGANTAR	viii
DAFTAR	a ISI	X
	TABEL	
	GAMBAR	
DAFTAR	LAMPIRAN	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian D. Kontribusi Penelitian	10
	E. Sistematika Pembahasan	12
D 4 D 77		
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	1.5
	A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan.	
	Administrasi Publik Administrasi Pembangunan	
	B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	20
	Desentralisasi dan Otollomi Daeran Pengertian Desentralisasi	20
	Pengertian Otonomi Daerah	22
	C. Pemerintahan Daerah	25
	D. Pembangunan Pertanian	26
	E. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Per	
	F. Konsep <i>Green Economy</i> (Ekonomi Hijau)	
	1. Ronsep Green Economy (Ekonomi Hijaa)	
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Fokus Penelitian	44
	C. Lokasi dan Situs Penelitian	47
	D. Jenis dan Sumber Data	47
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Instrument Penelitian	
	G. Analisis Data	52

BABIV		
	A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	55
	1. Kondisi Umum Wilyah Kota Kediri	
	a) Letak Geografis	55
	b) Topografi	55
	c) Demografi	
	d) Visi Pembangunan Kota Kediri	
	e) Misi Pembangunan Kota Kediri	57
	f) Karakteristik Tanah dan Iklim	58
	g) Lahan Menurut Ekosistem dan Penggunaannya	59
	2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Kediri	
	a) Struktur Organisasi	60
	b) Visi Dinas Pertanian Kota Kediri	62
	c) Misi Dinas Pertanian Kota Kediri	64
	d) Tujuan dan Sasaran	64
	e) Sumber Daya Manusia	66
	1) Pegawai Dinas Pertanian	
	2) Keragaan Penyuluh Pertanian	
	3) Keberadaan Kelompok Tani	
	4) Keberadaan Gabungan Kelompok Tani	
	5) Keberadaan Penyuluh Swadaya	
	f) Keadaan pertanian	
	1) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
	g) Sarana dan Prasarana	
	B. Penyajian Data	72
	Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan	
	Pertanian di Kota Kediri	72
	a) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
	Mendukung Pembangunan Pertanian	73
	1) Pembinaan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri	
	kepada Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	73
	2) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri kepada	
	Gapoktan dan Petani	76
	b) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
	Mendukung Pembangunan Pertanian	80
	1) Koordinasi Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri	
	dengan Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	80
	2) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dengan	
	Gapoktan dan Petani	82
	c) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
	mendukung Pembangunan Pertanian	83

1) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri kepada	
Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	84
2) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
Pelayanan kepada Gapoktan dan Petani	85
d) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
Mendukung Pembangunan Pertanian	88
1) Pengawasan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri	
Terhadap Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	88
2) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap	
Pelaksanaan Pembangunan Pertanian	89
2. Pembangunan Pertanian Berbasis <i>Green Economy</i> di Kota	
Kediri	92
a) Pengunaan Energi yang Ramah Lingkungan melalui	
Sistem Pertanian Organik	92
b) Pencegahan Pencemaran Lingkungan akibat Proses	
Produksi Pertanian	96
c) Pendorong Pertumbuhan dan Kualitas Pertanian	98
C. Pembahasan	100
1. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan	
Pertanian di Kota Kediri	100
a) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
Mendukung Pembangunan Pertanian	100
1) Pembinaan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri	
kepada Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	100
2) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri kepada	
Gapoktan dan Petani	101
b) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	101
Mendukung Pembangunan Pertanian	103
1) Koordinasi Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri	
dengan Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	103
2) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dengan	
Gapoktan dan Petani	104
c) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
mendukung Pembangunan Pertanian	106
1) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri kepada	
Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	106
2) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
Pelayanan kepada Gapoktan dan Petani	107
d) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam	
Mendukung Pembangunan Pertanian	108
1) Pengawasan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri	
Terhadap Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri	
2) Pengawasan Dinas Pertanjan Kota Kediri terhadan	



	Pelaksanaan Pembangunan Pertanian	110
	2. Pembangunan Pertanian Berbasis Green Economy di Kota	
	Kediri	111
	a) Pengunaan Energi yang Ramah Lingkungan melalui	
	Sistem Pertanian Organik	111
	b) Pencegahan Pencemaran Lingkungan akibat Proses	
	Produksi Pertanian	114
	c) Pendorong Pertumbuhan dan Kualitas Pertanian	117
BAB V	PENUTUP A. Kesimpulan	140
		119
	B. Saran	122
X . XX . X		10.1
DAFTAI	R PUSTAKA	124



DAFTAR TABEL

No	Judul Halaman
1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per
	Kecamatan Tahun 201357
2.	Luas Wilayah, Kemiringan dan Karakteristik Tanah
	di Kota Kediri Tahun 201359
3.	Luas Baku Lahan Berdasarkan Kecamatan dan Penggunaannya
	di Kota Kediri Tahun 201360
4.	Perincian Pegawai Dinas Pertanian Kota Kediri67
5.	Perincian Jenjang Kepangkatan Pegawai Dinas Pertanian Kota
	Kediri
6.	Keberadaan Penyuluh Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin Kota
	Kediri Tahun 201369
7.	Keberadaan Kelompok Tani di Wilayah Kota Kediri Tahun 201369
8.	Keberadaan Penyuluh Swadaya di Kota Kediri Tahun 201370
9.	Jumlah Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan, Holtikultura
	dan Perkebunan di Wilayah Kota Kediri Tahun 2012 dan 201371
10.	Rencana Luas Tanam, Luas Panen, Luas Produksi Tanaman Padi
	dan Polowijo di Kota Kediri Tahun 201471
11.	Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kota Kediri72

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman	53





DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah sekarang ini, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Otonomi daerah tumbuh karena adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak untuk mengubah sistem pemerintahan yang pernah ada. Muncul dan tumbuhnya otonomi daerah karena kebutuhan dari pemerintah yang ingin lebih baik lagi dengan kemandirian yang dimiliki baik kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun kemandirian dalam mengelola sumber daya yang ada.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi kontribusi penting bagi pelaksanaan pembagunan di suatu daerah. Melalui undang-undang tersebut sistem pemerintahan yang sebelumnya lebih bersifat sentralistis bergeser sehingga kapasitas pembangunan didesentralisasikan ke pemerintahan kota dan kabupaten, dengan harapan efisiensi dan kualitas pembangunan nasional akan semakin meningkat. Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman

dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia secara lahir dan batin. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai program kegiatan pembangunan di segala bidang di seluruh kawasan Republik Indonesia. Basis perekonomian di Indonesia adalah sektor pertanian, sehingga pembangunan yang diupayakan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan pertanian.

Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai negara dengan sektor agrarisnya yang luas dan memiliki peran penting dalam perekonomian dan sejarah yang panjang. Hal ini disebabkan karena Indonesia di dukung oleh potensi dan sumber daya alam yang cocok untuk pengembangan bidang pertanian seperti iklim tropis yang mendukung tanaman untuk tumbuh subur. Pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Ada beberapa hal yang mendasari pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain karena potensi sumber daya alam yang mendukung pencapaian swasembada, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bekerja dalam sektor pertanian, dan nilai ekonomis dari produk pertanian yang masih mampu ditingkatkan.

Pembangunan sering diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian menurut Soekartawi (2003:1) dapat diartikan dengan apabila terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Sektor pertanian dianggap penting terlebih dari peranan sektor

pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor dan sebagainya.

Menurut Mubyarto (1994:4), pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Dalam arti sempit pertanian dapat disimpulkan meliputi perkebunan rakyat, perikanan rakyat dan pencarian hasil-hasil hutan. Pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana di produksi bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian) dan tanaman-tanaman holtikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat diusahakan di tanah-tanah sawah, ladang, dan pekarangan. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki ciri khas yang berhubungan dengan peran sosial manusia pada alam dalam proses produksinya, karena manusia untuk pelaksanaan pada sektor pertanian membudidayakan tumbuhan dan hewan dengan ditunjang pengetahuan, teknologi, modal, dan organisasi.

Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pembangunan Pertanian. Pembangunan pertanian menurut Mubyarto pada hakikatnya merupakan kegiatan yang melibatkan empat aspek yang saling berkaitan, yaitu:

BRAWIJAYA

- 1. Petani sebagai subjek yang harus ditingkatkan kesejahteraan dan pendapatannya.
- 2. Komoditas pertanian sebagai objek yang harus ditingkatkan produksi dan produktivitasnya.
- 3. Teknologi sebagai alat yang harus di dayagunakan pemanfaatannya.
- 4. Lahan sebagai basis ekologi dan pendukung pakan yang harus dijaga kelestariannya.

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah daerah, merupakan suatu upaya pemerintah dalam menempatkan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kecil, dan merupakan kegiatan awal untuk memacu pembangunan ekonomi pertanian pasca otonomi daerah. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2000:13). Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi.

Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya, karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan

secara keseluruhan, terutama pada negara sedang berkembang yang berpendapatan rendah. Demi terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka diharapkan pemerintah daerah melakukan pembenahan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi. Pembangunan yang terlalu berorientasi pada bidang ekonomi akan berdampak terhadap lingkungan dan ekosistem. Dalam *Country Natural Resources and Environment/CNREAI* (Bappenas, 2007) menyatakan bahwa,

"Apabila pemanfaatan sumberdaya alam masih terus dilakukan secara ekstraktif dan dengan cara-cara lama yang kurang ramah lingkungan dan ekosistem, maka di masa depan Indonesia akan menghadapi 3 (tiga) krisis besar, yaitu (i) krisis air, (ii) krisis pangan, dan (iii) krisis energi. Krisis-krisis sumber daya alam tersebut sebagai akibat terjadinya pemanfaatan sumberdaya alam yang sudah melebihi daya regenerasi dan reproduksi serta daya dukung ekosistemnya."

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya menimbulkan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi daya reproduksi dan melebihi ambang serap alam terhadap limbah/sampah, baik sampah padat, cair maupun udara. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam membentuk perekonomian, karena dari sektor inilah sumber pangan diproduksi. Sektor pertanian ini menyerap sebagian besar tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan, baik secara rata-rata di suatu negara maupun secara global. Dengan demikian, pengelolaan pertanian yang berkelanjutan (sustainable farming) akan membentuk atau berperan besar dalam pembentukan ekonomi hijau di suatu negara. Hal lain yang lebih penting adalah komposisi kemiskinan dalam sektor pertanian juga sangat besar,

sehingga pembentukan *sustainable farming* akan menjadi peluang baru sebagai sarana menurunkan kemiskinan di sektor pertanian.

Menurut Djajadiningrat (2014:3), green economy secara konseptual adalah paradigma ekonomi yang membahas persoalan lingkungan dalam bangunan/arsitektur sistem perekonomian. Pertanian memberikan sumbangan bagi pembangunan dengan banyak cara. Dunia pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai aktivitas ekonomi, sebagai mata pencaharian, dan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan seperti yang telah disebutkan erat kaitannya dalam menjalankan green economy, dimana dalam konteks pembangunan ekonomi maka bukan hanya kemajuan fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan tetapi juga aspek keberlanjutan ekologis. Konsep dari green economy untuk pertanian bukan hanya sekedar proses untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran, tetapi juga membawa misi besar, yaitu menyadarkan manusia agar perduli dengan lingkungan.

United Nation Environment Programme (UNEP) (2011) memberikan pengertian green economy sebagai kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di satu sisi, tetapi di sisi lain mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Menurut UNEP, ekonomi hijau merupakan kegiatan perekonomian yang rendah karbon, tidak mengandalkan bahan bakar fosil, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam, ekonomi hijau harus dapat merubah pola pemanfaatan sumber daya alam yang eksploratif dan berjangka pendek ke pola pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi jangka panjang, mengacu pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan (pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar ekologis), serta bertumpu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada pilar ekonomi, sosial dan ekologis merupakan syarat penting mewujudkan pembangunan pertanian.

Lahan pertanian di Kota Kediri semakin berkurang tiap tahunnya karena kecenderungan alih fungsi menjadi lahan terbangun yang dapat menurunkan produksi pertanian. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berbasis *green economy* di Kota Kediri juga masih belum berjalan optimal, masih ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi baik aspek teknis, sosial, maupun ekonomi. Petani di Kota Kediri semakin tergantung pada pupuk kimia, lahan semakin rusak dan petani terpaksa harus berhutang sebagai modal awal mereka berproduksi saat harga pupuk dan bahan kimia lain semakin mahal. Pupuk dan bahan kimia telah merusak lahan pertanian. Saat petani menggunakan pupuk kimia, tanaman tidak hanya menyerap nitrogen, fosfor dan potasium lebih banyak, namun juga menyerap unsur nutrisi mikro dalam tanah, seperti unsur seng (zinc), besi (iron) dan tembaga (copper).

Tanah di Kota Kediri semakin lama semakin kekurangan nutrisi mikro sehingga kemampuan tanah untuk menyerap nitrogen, fosfor dan potasium menjadi terganggu. Hasilnya tanah di Kota Kediri semakin kering dan produktivitas lahan terus menurun. Banyak petani Kota Kediri yang tidak memahami siklus ini mencoba mengatasi kurang suburnya lahan dengan memperbanyak pupuk kimia. Tindakan petani ini akhirnya memercepat krisis lahan. Pola ini juga merusak ekonomi petani dan sistem pertanian lokal. Banyak petani yang tidak mampu mengolah lahan pertanian karena mahalnya biaya berproduksi, akhirnya menjual tanah mereka dan menjadi petani penggarap. Pada saat yang sama, tenaga manusia digantikan dengan traktor.

Kawasan pertanian di Kota Kediri dibedakan atas pertanian tanaman pangan, perkebunan, hutan produksi, peternakan dan kawasan perikanan. Agenda pembangunan pertanian di Kota Kediri ditempuh dengan dua sisi, yaitu: On Farm (Budidaya yang arahnya untuk meningkatkan produksi atau produktivitas) dan Off Farm (Penanganan atau pengolahan bahan pasca produksi). Sasaran pembangunan pertanian berbasis green economy di Kota Kediri juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian secara luas (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dengan menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA), meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dan profesionalisme aparat serta meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini berarti, pemerintah tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang lemah yang selalu bergantung pada pemerintah. Akan tetapi, pemerintah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki potensi, sehingga perlu dibangkitkan kesadaran, motivasi, mendorong serta mengembangkan potensi sumber daya yang mereka miliki.

Dalam garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dijelaskan bahwa pembangunan pertanian diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Pengertian maju, efisien, dan tangguh dalam ekonomi pertanian mencakup konsep-konsep mikro dan makro: yaitu bagi sektor pertanian sendiri maupun dalam hubungannya dengan sektor-sektor lain di luar pertanian, misalnya industri, transportasi, perdagangan, dan keuangan atau perkreditan. Selanjutnya pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan perekonomian lokal.

Karena kelangsungan pembangunan pertanian mensyaratkan adanya tingkat nilai mutu lingkungan yang sesuai dan demi berlangsungnya kehidupan yang mensejahterahkan rakyat, pemerintah berkewajiban untuk berperan aktif di dalam pengelolaan mutu lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan pertanian berbasis *green economy*. Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS *GREEN ECONOMY* (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Kediri)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kota Kediri?
- berbasis green economy di Kota 2. Bagaimana pembangunan pertanian is . Kediri?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kota Kediri.
- 2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pembangunan pertanian bebasis green economy di Kota Kediri.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya terdapat kontribusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

- 1. Kontribusi Akademis
 - a) Bagi Mahasiswa

- Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya

b) Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

a) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berbasis *green economy*.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan gambaran masyarakat mengenai pembangunan pertanian berbasis *green* economy.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat. Demikian halnya dengan penyusunan skripsi ini, dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab. Pertama, berisi tentang Latar Belakang masalah yang merupakan alasan yang menjadi pijakan pemilihan judul skripsi serta fenomena-fenomena yang dijumpai. Kedua, Rumusan Masalah penelitian yang meliputi peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kota Kediri dan bagaimana pembangunan pertanian berbasis green economy di Kota Kediri. Ketiga, Tujuan Penelitian yang hendak di capai antara lain untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian berbasis green economy di Kota Kediri. Keempat, Kontribusi Penelitian yang meliputi kontribusi akademis dan kontribusi praktis. Kelima, sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Disamping itu juga berisi definisi operasional variabel-variabel penelitian yang ada, juga berisi model penelitian dan pertanyaan penelitian yang jawabannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Pertama, mengenai jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian. Ketiga, lokasi penelitian di Kota Kediri. Keempat, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Keenam, instrumen penelitian melalui peneliti sendiri, *field note* dan pedoman wawancara. Ketujuh, analisis data melalui tahaptahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang temuan-temuan penelitian yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data yang dilakukan, serta dilanjutkan dengan analisis peneliti terhadap temuan-temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada di dalam bab dua.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dengan menemukan benang merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kota Kediri.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

1. Administrasi Publik

Administrasi telah didefinisikan oleh para ahli. Definisi yang menjelaskan administrasi secara umum yaitu menurut Herbert A. Simon dalam Miftah Thoha (2010:25-26) administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi pada prinsipnya mengandung arti proses kegiatan kerja sama, dilakukan oleh banyak orang, untuk mencapai tujuan. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik dinyatakan sebagai administrasi publik.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (1995:4) menjelaskan bahwa segenap proses penyelenggaraan usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal tujuan tersebut adalah tujuan negara/pemerintahan maka menjadi lingkup wilayah ilmu administrasi publik. Proses kerjasama untuk mencapai tujuan harus didasarkan pada rasionalitas. Hal ini ditekankan bahwa inti dari administrasi publik adalah rangkaian tindakan yang rasional, yaitu didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dipertimbangkan secara teliti untuk merealisir tujuan tertentu.

Perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi terus berkembang, menurut Kartasasmita (1997:24), perkembangan yang cukup mendasar telah terjadi dengan munculnya kebijakan publik sebagai paradigma administrasi publik. Didalamnya tercakup perumusan kebijaksanaan, teknis analisis kebijakan, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Hal ini senada dengan penjelasan Tjokroamidjojo (1995:6) bahwa administrasi publik memiliki tiga fungsi dasar, yaitu:

- 1. Formulasi atau perumusan kebijakan. Terdiri dari empat sub fungsi, yaitu yang pertama kebijaksanaan berasal dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan yang nyata. Kedua, perumusan kebijaksanaan harus meliputi usaha untuk memproyeksikan kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan dengan cara melakukan perkiraan dari perkembangan yang mungkin terjadi, serta dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin dilalui. Ketiga, supaya suatu program strategi dan taktik kegiatan yang berdasar pada poin satu dan dua dapat disusun. Dan yang keempat, pengambilan keputusan.
- 2. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi yang meliputi organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, dan mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut.

3. Penggunaan dinamika administrasi. Unsur-unsur dinamik administrasi meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi.

Tugas administrasi publik di negara yang sedang membangun mencakup tugas umum administrasi untuk publik dan tugas pembangunan. Administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, administrasi publik bukan saja berhubungan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses pembangunan, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Hal ini berimplikasi pada pentingnya perhatian dan komitmen negara terhadap kepentingan publik yang jika dilaksanakan dengan baik diharapkan dapat mewujudkan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil demi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan dapat diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara maju modernitas/perbaikan dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2012:4).

Pembangunan secara lebih luas disampaikan oleh Tjokroamidjojo (1995:13) yaitu merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar yakni sebagai objek dan subjek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dinamis; kedalam mampu menciptakan keseimbangan. Administrasi pembangunan sendiri selanjutnya diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan uang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Siagian (2012:13) memberi gambaran bahwa fokus dari administrasi pembangunan adalah penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara. Dengan demikian batasan tentang administrasi pembangunan menurut Siagian adalah sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suaru negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan akhirnya. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil.

Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan (Katz dalam Tjokroamidjojo, 1995). Adapun ruang lingkup administrasi pembangunan meliputi dua fungsi, yaitu:

- 1. Penyempurnaan administrasi negara atau disebut juga sebagai pembangunan administrasi (*the development of administration*), yaitu melakukan usaha penyempurnaan di bidang organisasi dan kelembagaan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana administrasi lainnya.
- 2. Administrasi untuk pembangunan, yaitu administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (the administration of development) (Tjokroamidjojo, 1995).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan, meliputi administrasi untuk perencanaan, yang pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Lebih lanjut, administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan administrasi negara untuk penyempurnaan agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Tugas pokok dalam administrasi pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai

dasar dalam pelaksanaan program-program pembangunan, khususnya di negara berkembang.

Tjokroamidjojo (1995:25), menjelaskan tentang aspek-aspek yang saling mempengaruhi administrasi pembangunan yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek perkembangan ilmu, teknologi dan lingkungan fisik, serta aspek isntitusional. Aspek-aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan, juga terkait dengan peran pemerintah sebagai salah satu aktor dalam pembangunan. Siagian (2012:43) menyatakan bahwa pemerintah tetap memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan nasional baik selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan tentunya sebagai pelaksana dari suatu kegiatan pembangunan tertentu.

B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Pengertian Desentralisasi

Sistem pemerintahan yang desentralisasi merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Pada sistem yang sentralisasi, wewenang pembuatan keputusan berbagai urusan publik berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di propinsi dan kabupaten merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, pada sistem desentralisasi sebagian kewenangan pengelolaan urusan publik dilimpahkan kepada provinsi dan kabupaten. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, desentralisasi

diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Tjokroamidjojo (1985:81) terdapat empat bentuk desentralisasi, antara lain:

- 1. Sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh (Comprehensive Local Government System). Dalam hal ini pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (Multi Purpose Authorities). Aparat daerah melakukan fungsifungsi yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kesempatan berprakarsa atau berinisiatif untuk melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka dari aparat daerah maupun bagi aparat pusat. Aparat daerah melakukan pelayanan tugas-tugas aparat pusat atau transformasi tugas-tugas dari aparat pusat kepada aparat daerah.
- 2. *Partnership System*, yaitu jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah.
- 3. *Dual System*, yaitu aparat pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung dan demikian juga aparat daerah.
- 4. Integrated Administrative System, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung dibawah pengawasan seorang pejabat koordinator. Aparat daerah hanya punya kewenangan kecil dalam melakukan kegiatan pemerintahan.

Desentralisasi atau otonomi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik disegala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien diseluruh wilayah tersebut. Dari adanya pelaksanaan desentralisasi ini, timbulah daerah otonom dan diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Menurut Tjokroamidjojo (1995:82), desentralisasi ini akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

- 1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembanguan, serta mendorong pemerataan hasilhasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
- 2. Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah mengandung dua unsur kata yaitu otonomi dan daerah. Secara etimologis, kata otonomi berasal dari kata "autos" yang berarti sendiri, dan "nomos" yang berarti aturan. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemeritahan daerah pasal 1 ayat 6: otonomi daerah adalah hak, wewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004:59). Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengalahkan prakasa dan peran aktif masyarakat, maupun meningkatkan pemberdayaan potensi daerah secara optimal dan terpadu, serta nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatauan bangsa, serta mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan dapat melaksanakan tugas ekonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, kaena kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting guna mengukur otonomi suatu daerah. Otonomi daerah memiliki beberapa prinsip, prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini

- 2. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat
- 3. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
- 4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
- 5. Penyelenggaraan ekonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

6. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Prinsip-prinsip dari otonomi daerah kemudian menghasilkan suatu tujuan mengapa dilaksanakan otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah (*local goverment*) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) mempunyai definisi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya badan pelasana (eksekutif) saja. Pemerintahan daerah (local government) dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2011) diartikan sebagai pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara. Urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian local government bersifat locality dan basis politiknya adalah lokalitas dan bukan bangsa.

D. Pembangunan Pertanian

Pembangunan sering diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian menurut Soekartawi (1994:1) dapat diartikan dengan apabila terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Sektor pertanian dianggap penting terlebih dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor dan sebagainya. A.T Mosher (1991) telah menganalisa syarat-syarat pembangunan pertanian di banyak negara dan menggolongkannya menjadi syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar. Terdapat lima syarat yang harus ada dalam pembangunan pertanian. Apabila satu syarat tersebut tidak ada, maka terhentilah

pembangunan pertanian. Pertanian dapat berjalan terus tetapi sifatnya statis. Syarat-syarat mutlak yang harus ada dalam pembangunan pertanian menurut Mosher (1991:77), antara lain:

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani.

Tidak ada yang lebih menggembirakan petani produsen daripada diperolehnya harga yang tinggi pada waktu ia menjual produksinya. Harga baik atau buruk (tinggi atau rendah) pada umumnya dilihat petani dalam hubungan dengan harga-harga saat panen sebelumnya. Pembangunan pertanian meningkatkan produksi hasil pertanian. Untuk hasil-hasil itu perlu ada pasaran serta harga yang cukup tinggi guna membayar kembali biaya-biaya tunai dan daya upaya yang telah dikeluarkan petani sewaktu memproduksikannya.

2. Teknologi yang senantiasa berkembang.

Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. A.T Mosher menganggap teknologi yang senantiasa berubah itu sebagai syarat mutlak adanya pembangunan pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam teknologi maka pembangunan pertanian pun terhenti. Produksi terhenti kenaikannya, bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau karena kerusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang semakin merajalela.

Teknologi sering diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan ketrampilan di bidang industri. Tetapi Mosher mengartikan teknologi pertanian sebagai cara-cara bagaimana pertani menyebarkan benih, memelihara tanaman dan memungut hasil serta memelihara ternak. Termasuk pula didalamnya benih, pupuk, pestisida, obat-obatan serta makanan ternak yang dipergunakan, perkakas, alat, dan sumber tenaga. Termasuk juga didalamnya berbagai kombinasi cabang usaha, agar tenaga petani dan tanahnya dapat digunakan sebaik mungkin.

Yang perlu disadari adalah pengaruh dari suatu teknologi baru pada produktivitas pertanian. Teknologi baru yang diterapkan dalam bidang pertanian selalu dimaksudkan untuk menaikkan produktivitas tanah, modal, atau tenaga kerja. Seperti halnya traktor lebih produktif daripada cangkul. Pupuk buatanlebih produktif daripada pupuk hijau dan pupuk kandang, menanam padi dengan baris lebih produktif daripada menanamnya dengan tidak teratur. Demikianlah masih banyak lagi caracara bertani baru, dimana petani setiap waktu dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Dalam menganalisa peranan teknologi baru dalam pembangunan pertanian, digunakan dua istilah lain yang sebenarnya berbeda namun dapat dianggap sama yaitu perubahan teknik (technical change) dan inovasi (inovation) menurut Mubyarto (1989:235), istilah perubahan teknik jelas menunjukkan unsur perubahan suatu cara baik dalam produksi maupun dalam distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang

menjurus ke arah perbaikan oleh peningkatan produktivitas. Misalnya adapetani yang berhasil mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada rekan-rekannya karena ia menggunakan sistem pengairan yang lebih teratur. Caranya hanya dengan menggenangi sawah pada saat-saat pupuk pada waktu menyebarkan tertentu dan sesudah mengeringkannya untuk memberikan kesempatan kepada tanaman untuk mengisapnya. Sedangkan inovasi berarti pula suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, artinya selalu bersifat baru. Sebagai contoh, penerapan bibit karet yang unggul dalam penanaman baru adalah inovasi.

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.

Bila petani telah terangsang untuk membangun dan menaikkan produksi maka ia tidak boleh dikecewakan. Apabila pada suatu daerah petani telah diyakinkan akan kebaikan mutu suatu jenis bibit unggul atau oleh efektivitas penggunaan pupuk tertentu atau oleh mujarabnya obat pemberantas hama dan penyakit, maka bibit unggul, pupuk, dan obatobatan yang telah didemonstraksikan itu harus benar-benar tersedia secara lokal di dekat petani, di mana petani dapat membelinya. Kebanyakan metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi khusus oleh petani. Diantaranya termasuk bibit, pupuk, pestisida, makanan, dan obat ternak. Pembangunan pertanian menghendaki serta perkakas. kesemuannya itu tersedia di atau dekat pedesaan (lokasi usaha tani),

dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi keperluan tiap petani yang membutuhkan dan menggunakannya dalam usaha taninya.

4. Adanya perangsang produksi bagi petani

Cara-cara kerja usaha tani yang lebih baik, pasar yang mudah dijangkau dan tersedianya saran dan alat produksi memberi kesempatan kerja kepada petani untuk menaikkan produksi. Begitu pula dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi Pemerintah perangsang produksi bagi petani. menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus dapat merangsang yang pembangunan pertanian. Misalnya kebijaksanaan harga beras minimum, subsidi harga pupuk, kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang intensif, perlombaan-perlombaan dengan hadiah menarik pada petanipetani teladan, dan lain-lain. Pendidikan pembangunan pada petanipetani di desa, baik mengenai teknik-teknik baru dalam pertanian maupun mengenai ketrampilan-ketrampilan lainnya juga sangat membantu menciptakan iklim yang menggiatkan usaha pertanian. Akhirnya kebijaksanaan harga pada umumnya yang menjamin stabilitas harga-harga hasil pertanian merupakan contoh yang dapat meningkatkan rangsangan pada petani untuk bekerja lebih giat dan mereka akan lebih pasti dalam usaha untuk meningkatkan produksi.

5. Tersedianya perangkutan yang lancar dan kontinyu

Dalam pembangunan pertanian terdapat unsur perangkutan. Tanpa perangkutan yang efisien dan murah maka pembangunan pertanian tidak

dapat diadakan secara efektif. Pentingnya perangkutan adalah bahwa produksi pertanian harus tersebar meluas, sehingga diperlukan jaringan perangkutan yang menyebar luas, untuk membawa sarana dan alat produksi ke tiap usaha tani dan membawa hasil usaha tani ke pasaran konsumen baik di kota besar dan/atau kota kecil. Selanjutnya, perangkutan haruslah diusahakan semurah mungkin. Bagi petani, harga suatu input seperti pupuk adalah harga pabrik ditambah biaya angkut ke usaha taninya. Uang yang diterimanya dari penjualan hasil pertanian adalah harga di pusat dikurangi dengan biaya angkut hasil pertanian tersebut dari usaha tani ke pasar. Jika biaya angkut terlalu tinggi, maka pupuk akan menjadi terlalu mahal bagi petani dan uang yang diterimanya dari penjualan hasil pertanian tersebut akan menjadi terlalu sedikit. Sebaliknya, jika biaya angkut rendah, maka uang yang diterima oleh tinggi. Terdapat beberapa petani akan menjadi faktor yang mempengaruhi biaya perangkutan, antara lain:

- a) Sifat barang yang harus diangkut, berapa berat atau besarnya barang itu.
- b) Jarak pengangkutan barang-barang itu.
- c) Banyaknya barang yang diangkut.
- d) Jenis alat perangkutan.

Beberapa sarana perangkutan dari jarak jauh bersama-sama harus membentuk sistem perangkutan yang merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Tidak hanya jalan raya yang diaspal, jalan setapak, jalan tanah, saluran air, jalan raya, sungai, dan jalan kereta api, tetapi semuanya harus ikut memperlancar peragkutan. Beberapa diantaranya dapat dibuat dan dipelihara oleh usaha setempat, termasuk pemerintah setempat. Beberapa lagi perlu dibangun dipelihara oleh pemerintah propinsi dan pusat. Kesemuanya harus dihubungkan dan diintegrasikan satu dengan yang lainnya, sehingga hasil pertanian dapat diangkut dengan lancar dari usaha tani ke pasar-pasar pusat. Demikian pula sarana dan alat produksi serta berbagai jasa tidak hanya perlu sampai ke kota kecil dan desa, melainkan juga sampai ke usaha tani itu sendiri.

Di samping syarat-syarat mutlak diatas, terdapat lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi apabila ada benar-benar akan memperlancar pembangunan pertanian. Yang termasuk dalam syarat-syarat pelancar menurut Mosher (1991:149), adalah:

- a) Pendidikan pembangunan
- b) Kredit produksi
- c) Kegiatan gotong-royong petani
- d) Perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Perencanaan nasional pembangunan pertanian

E. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pertanian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005:854), peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sementara peranan diartikan sebagai tindakan

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pemahaman tersebut maka peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Siagian (2012:142) menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama, yaitu:

- 1. Selaku stabilisator, bahwa pemerintah daerah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan semua rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan lancar.
- Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara kehidupan modern.
- 3. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.
- 4. Selaku inovator, inovasi merupakan salah satu "produk" dari kreatifitas.

 Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir yang baru. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur, dan metode kerja, serta

- pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat "problem-solving" dan "action-oriented".
- 5. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

Menurut Guy Hunter dalam bukunya yang berjudul *The Administration of Agricultural Development*, (London: Oxford University Press, 1970:9-10) yang diterjemahkan oleh Mubyarto (1994:37) menyimpulkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan pertanian pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu:

- 1. Mengkoordinasi di dalam tindakan-tindakan administrasi pemerintah dalam rangka melayani keperluan petani yang bermacam-macam seperti informasi-informasi pertanian, bantuan teknik, investasi dan persoalan kredit, pemasaran, dan lain-lain.
- 2. Mengatur pola hubungan yang senantiasa berubah antara jasa-jasa yang dapat diberikan oleh pemerintah dengan jasa-jasa para pedagang atau koperasi.
- 3. Mendorong partisipasi petani dan penduduk dalam keseluruhan usaha pembangunan pertanian

BRAWIJAYA

4. Mendukung kelembagaan yaitu keperluan akan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tertentu pada tahap pembangunan yang senantiasa berubah.

Sedangkan menurut Mubyarto (1994:38) peranan pemerintah dalam pembangunan pertanian antara lain:

- Menentukan kebijaksanaan harga dan pendapatan.
 Stabilitas harga hasil-hasil pertanian dalam keadaan harga-harga umum yang stabil berarti pula kestabilan pendapatan
- 2. Menentukan kebijakan pemasaran.

 Selain kebijakan harga untuk melindungi petani produsen, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan tekanan kepada perubahan mata rantai pemasaran pada produsen ke konsumen, dengan tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani.
- 3. Menentukan kebijakan struktural

 Kebijakan struktural yang dimaksud dalam pertanian dimaksudkan untuk

 memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah,

 pengenalan dan pengusahaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan

 prasarana pertanian pada umumnya baik prasana fisik maupun sosial

 ekonomi.
- 4. Manajemen usaha tani

BRAWIJAY

Manajemen usaha tani yang dimaksud adalah untuk mengusahakan perimbangan antara pendapatan sektor pertanian dan pendapatan diluar sektor pertanian termasuk sektor industri.

Dimensi pemerintahan membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dan peran pemerintah yang kuat. Peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan sempitnya fungsi tanggung jawab, bersifat reaktif, otonomi/diskresi yang rendah dan derajat kontrol eksternal yang tinggi. Peran pemerintah daerah yang kuat ditandai dengan luasnya fungsi tanggung jawab, bertindak positif, dan tingkat otonomi/diskresi yang tinggi.

F. Konsep Green Economy (Ekonomi Hijau)

Ekonomi hijau secara konseptual adalah paradigma ekonomi yang menginternalisasi persoalan lingkungan dalam bangunan/arsitektur sistem perekonomian (Djajadiningrat, 2014:3). Pertanian memberikan sumbangan bagi pembangunan dengan banyak cara. Dunia pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai aktivitas ekonomi, sebagai mata pencaharian, dan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan seperti yang telah disebutkan erat kaitanya dalam menjalankan ekonomi hijau, di mana dalam konteks pembangunan ekonomi maka bukan hanya kemajuan fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan tetapi juga aspek keberlanjutan ekologis.

Ekonomi hijau juga diterapkan melalui efisiensi penggunaan sumber daya baik dalam pola konsumsi maupun produksi yang berkelanjutan, regulasi terhadap hal ini dapat dilakukan dengan penerapan pajak yang tinggi terhadap kegiatan konsumsi dan produksi barang yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna lingkungan hidup yang besarnya minimal cukup untuk menggantikan berbagai dampak negatif dari kegiatan tersebut. Dan sebaliknya, bentuk subsidi dapat diberlakukan bagi kegiatan konsumsi maupun produksi yang meningkatkan kelestarian lingkungan. Kembali lagi hal ini harus disusun hingga kerangka teknis dan penghitungan detil sehingga dapat dimasukan kedalam penghitungan APBN. Untuk mewujudkan pelaksanaan penuh ekonomi hijau baik dalam hal konsep, struktur, hingga pelaksanaannya membutuhkan tidak hanya keinginan, semangat, dan dukungan dari seluruh pihak tetapi juga sinergitas dari berbagai *stakeholders*.

Hal yang perlu ditekankan yakni dunia sedang terancam menghadapi bencana besar akibat dari semakin buruknya efek rumah kaca yang ditimbulkan karena cepatnya pembangunan ekonomi dan teknologi guna memnuhi kebutuhan manusia. Ekonomi hijau merupakan salah satu cara yang paling tepat untung diterapkan di Indonesia guna melakukan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Terdapat sepuluh prinsip ekonomi hijau (green economy) menurut Djajadiningrat (2014, 132-134) yaitu sebagai berikut:

1. Mengutamakan nilai guna, nilai intristik dan kualitas.

Ini adalah prinsip dasar dari ekonomi hijau sebagai ekonomi pelayanan, terpusat pada hasil akhir dan kebutuhan lingkungan. Bahan utama adalah sarana untuk kepuasan akhir dari kebutuhan riel, dan secara radikal dapat

dikonservasikan. Uang juga harus dikembalikan pada status sebagai sarana untuk memfasilitasi pembaruan dari pertukaran daripada hasil akhirnya.

2. Mengikuti aliran alam.

Ekonomi bergerak bagaikan kapal yang berlayar dengan tiupan angin sebagai suatu proses yang alamiah tidak hanya solar, energi yang diperbaharukan, tetapi juga dengan siklus hidrologi yang alamiah dengan vegetasi nasional dan jarring-jaring makanan dan dengan material lokal. Masyarakat menjadi lebih peka terhadap aspek ekologi sehingga batas politik dan ekonomi akan menjadi seiring dengan batas ekosistem, dan menumbuhkan konsep dan kegiatan regional.

3. Sampah adalah makanan.

Alam tidak mengenal sampah, sehingga setiap keluaran suatu proses menjadi asupan untuk proses yang lain. Prinsip ini tidak hanya mempunyai implikasi pada tingginya kompleksitas organisasi tetapi juga keluaran produk sampingan harus cukup bergizi dan tidak memiliki toksik sehingga dapat menjadi asupan bagi kegiatan lainnya.

4. Rapih dan keragaman fungsi

Jaring-jaring makanan yang kompleks adalah implikasi dari berbagai hubungan yaitu hubungan yang terintegrasi di mana secara diameteris bertolak belakang dengan segmentasi dan fragmentasi masyarakat. Dalam hal ini setiap strategi penyeleseian masalah bertumpu pada kemenangan bersama serta nilai positif dari kegiatan lain.

5. Skala tepat guna/skala keterkaitan.

Sekecil kecilnya aktivitas akan mempunyai dampak yang lebih besar dan sebesar-besarnya aktivitas akan mempunyai dampak terhadap aktivitas yang kecil.

6. Keanekaragaman.

Dalam dunia dan perubahan yang terus menerus, kesehatan dan stabilitas tergantung pada keanekaragaman. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan/keanekaragaman (jenis tumbuhan, binatang, ekosistem, dan regional), juga keanekaragaman sosial dan organisasi ekologis.

7. Kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri

Suatu sistem yang kompleks membutuhkan hierarkhi sarang dari intelegensia yang mengkoordinasikan sistemnya sendiri dalam suatu gerakan yang terstruktur. Kemampuan diri bukanlah kemampuan memenuhi kebutuhan, tetapi memfasilitasi interdependensi yang lebih fleksibel dan holistic.

8. Partisipasi dan demokrasi yang langsung.

Agar mampu fleksibel dan tangguh, rancangan ekonomi yang berbasis ekologi harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

9. Kreativitas dan pengembangan masyarakat.

Dalam perubahan hijau, pribadi dan politik, sosial dan ekologi berjalan seiring. Sosial, estetika, kapasitas spiritual menjadi sentral untuk mencapai efisiensi ekonomi dan merupakan suatu tujuan yang penting.

10. Peran strategis dalam lingkungan buatan, lanskap, dan perancangan spasial.

Konversi ekonomi hijau harus radikal, tetapi juga harus bertahap dan dapat terus tumbuh dan berulang.

Dasar dalam merumuskan pembangunan pertanian dalam konsep ekonomi hijau (green economy) menurut Djajadiningrat (2014:52), yaitu:

- 1. Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas pertanian
- 2. Mendapatkan kebutuhan pokok mengenai pekerjaan, makanan, energi, air, dan sanitasi
- 3. Melakukan konservasi dan kemampuan sumber daya
- 4. Memadukan pertimbangan lingkungan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan

Tentunya penerapan ekonomi hijau di Indonesia juga didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain :

- 1. Ekonomi di Indonesia masih sangat menggantungkan diri pada pengelolaan sumber daya alam. 60% dari jumlah penduduk di Indonesia bermata pencaharian pada bidang pertanian.
- 2. Dengan menerapkan ekonomi hijau, selain Indonesia akan menjadi pelopor di tingkat global, ekonomi Indonesia akan mengarah kepada ekonomi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan juga akan lebih berkelanjutan.

3. Ekonomi hijau dapat memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang semakin hari semakin terasa bertambah rusak dan hal tersebut merupakan suatu masalah nyata yang di hadapai oleh sebagian masyarakat.

Ekonomi hijau disini berperan untuk menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam, mencegah pencemaran lingkungan akibat proses produksi dengan peningkatan kemampuan alam atau lingkungan dalam menghancurkan sampah atau limbah agar tidak menjadi polusi. Pendekatan kebijakan ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, termasuk diantaranya menggerakkan perekonomian yang rendah karbon. Bagi Indonesia landasan filosofis dari Ekonomi Hijau memiliki kaitan yang sangat erat jika kita merujuk pada pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam Pancasila, konsep ekonomi hijau setidaknya dapat dilihat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan dalam konteks kemanusiaan, namun juga menyangkut keadilan terhadap semesta alam atau lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan seperti ekonomi hijau menuntut pengelolaan alam sedemikian rupa sehingga kualitas dan ketersediaan jangka panjangnya terjamin. Pencapaian keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam merupakan tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Didalamnya termasuk peningkatan ragam

kehidupan berbagai jenis spesies, variasi turunanya, dan berbagai ekosistem dimana mereka hidup. Dalam pelaksanaanya, menurut Djajadiningrat (2014:27) ekonomi hijau memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- Kepemilikan faktor produksi oleh generasi saat ini harus dipandang sebagai titipan dari generasi yang akan datang.
- 2. Lingkungan alami seperti air, tanah, atmosfer, flora fauna serta energi yang dipasok oleh sinar matahari perannya dapat dilihat sebagai bahan baku dalam proses industri, namun harus diseimbangkan melalui aliran energi dan daur ulang yang kontinyu dalam suatu ekosistem.
- 3. Hilangnya sumber daya alam dan degradasi lingkungan sebagai akibat pembangunan harus diperhitungkan sebagai hilangnya kekayaan dan perlu dikurangkan dari nilai Produk Domestik Regional Bruti (PDRB)
- 4. Produksi bersih merupakan salah satu pemikiran baru dalam pengelolaan limbah. Produksi bersih ini merupakan strategi dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Tujuannya yakni meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada penggunaan bahan mentah, energi serta air. Dan mendorong perfomansi lingkungan yang lebih baik melalui penurangan sumber–sumber pembangkit limbah dan emisi serta mereduksi dampak produk bagi lingkungan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2013:4) Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui sebuah fenomena yang terjadi dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, dan pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan adanya kesesuaian antara situasi dan kondisi agar metode penelitian yang digunakan tepat dalam memperoleh pemahaman berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2013:4) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong. 2014:6).

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan memberikan suatu gambaran ilmiah atau menjelaskan keadaan obyek peneltian pada saat sekarang terhadap fakta-fakta yang ada kemudian dapat di interpretasikan secara tepat, sehingga menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis. Pemilihan metode ini didasari anggapan bahwasannya metode inilah yang dianggap paling tepat untuk menjelakan dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam yang sesuai dengan tujuan penelitian. Disini peneliti bermaksut akan menggambarkan tentang peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian berbasis green economy.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan faktor penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Menurut Moleong (2014:97), fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran secara

umum tentang objek yang akan diteliti. Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Moleong (2014:98) berfungsi untuk:

- 1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang *inquiri* (masukan), misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
- 2. Memenuhi kriteria *inquiri-ekskusi* (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan adanya fokus penelitian seseorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dan data-data mana yang harus dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya Spradley dalam Sugiyono (2014:34) mengemukakan empat alternatif untuk menentukan fokus, yaitu:

- 1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
- 2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu/organizing domain.
- 3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teoriteori yang ada.

Dari beberapa pengertian diatas yang telah dijelaskan oleh para ahli, maka beberapa hal yang menjadi fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kota Kediri di tinjau dari:
 - a) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
 - b) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
 - c) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
 - d) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
- 2. Pembangunan pertanian berbasis *green economy* di Kota Kediri di tinjau dari:
 - a) Penggunaan energi yang ramah lingkungan dalam pertanian melalui sistem pertanian organik
 - b) Pencegahan pencemaran lingkungan akibat proses produksi pertanian
 - c) Pendorong pertumbuhan dan kualitas pertanian

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Kediri. Sedangkan situs penelitian di Dinas Pertanian Kota Kediri. Beberapa pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian:

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang memiliki potensi di bidang pertanian yang dapat dikembangkan.

2. Situs Penelitian:

Dinas Pertanian Kota Kediri dianggap mampu memberikan informasi yang tepat, valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2013:56). Alat yang menjadi sumber informasi adalah seseorang atau yang dapat dijadikan sebagai narasumber. Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut sangat

penting atau diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan, agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan.

Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi wawancara mendalam. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, laporan, dan referensi dari internet maupun koran yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran penelitian yang dilaksanakan, sangat penting digunakan metode pengumpulan data yang baik. Sugiyono (2014:62) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Arikunto (2013:39) menjelaskan bahwa pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014:68), objek observasi terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a) *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- b) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c) Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi, yakni peneliti tidak melibatkan diri dalam lingkungan yang diamati, peneliti hanya sebagai pengumpul data saja. Yang akan diamati dalam proses observasi ini akan dilakukan secara fleksibel melihat kondisi objek dan lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan semua panca indera yang dimiliki oleh peneliti dan disesuaikan dengan objek penelitian dan berlandaskan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan catatan lapangan yang merupakan catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Instrumen ini digunakan agar peneliti dapat terhindar dari kesalahan akan apa yang telah diamati.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian." Ditinjau dari pelaksanaannya menurut Arikunto (2013) wawancara dibedakan menjadi:

- a) Interview bebas (inguided interview), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja;
- b) Interview terpimpin (guided interview), yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci;
- c) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dengan interview terpimpin. Pewawancara hanya membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* terpimpin dimana peneliti menggunakan sederet pertanyaan lengkap dan terperici atau disebut juga dengan pedoman wawancara guna memperoleh tujuan penelitian. Penulis juga mengadakan tanya jawab secara langsung, percakapan secara langsung kepada responden. Wawancara dilakukan dengan informan terhadap semua aspek objek yang diteliti. Tujuan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data yang memadai tentang objek penelitian secara langsung dari kata dan tindakan informan.

3. Dokumentasi

Peneliti memfokuskan pengumpulan data melalui data dan arsip Dinas Pertanian, buku yang relevan, dan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan serta beberapa artikel yang ada di media cetak maupun internet.

4. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumendokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Sugiyono (2014:59) mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan peran serta, namun peranan penelitilah yang sangat menentukan keseluruhan skenarionya. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan secara sistematik menggunakan beberapa alat bantu elektronik. Instrumen yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data di lapangan yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi melalui observasi dan melakukan wawancara.

2. Instrumen pembantu, terdiri dari:

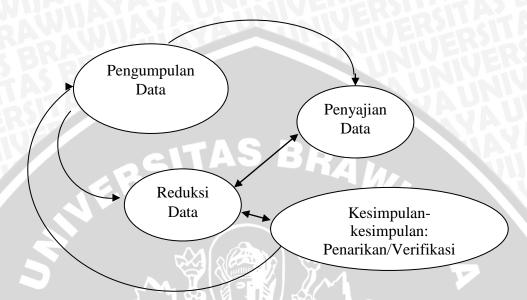
- a) Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu berupa materi poin-poin yang menjadu dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan informan.
- b) Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian ditunjang dengan pengambilan gambar (foto).

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014:87) menyatakan bahwa analisis data dalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisasi berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya akan dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah dipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Sugiyono (2014:91), yaitu:



Gambar 1 Analisis Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Sugiyono (2014:91)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, observasi ke lapangan dan dokumentasi.

Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan, menggolongkan, membuang data yang dianggap tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun bentuk kalimat atau uraian.

Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menenerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasanpenjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Kondisi Umum Wilayah Kota Kediri

a) Letak Geografis

Kota Kediri terletak antara 111,05°-112,03° bujur timur dan 7,45°-7,55° lintang selatan dengan ketinggian 67 m dari permukaan laut, dengan kemiringan 0-40%. Secara administratif wilayah Kota Kediri terdiri dari 46 kelurahan dan 3 kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Gampengrejo, Kec. Ngasem dan Kec.

 Grogol, Kab. Kediri
- Sebelah Timur : Kec. Wates dan Gurah, Kab. Kediri
- Sebelah Selatan: Kec. Kandat dan Ngadiluwih, Kab. Kediri
- Sebelah Barat : Kec. Grogol dan Semen, Kab. Kediri

b) Topografi

Kota Kediri dengan luas wilayah 63,404 Km², terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan yaitu:

- Kec. Mojoroto, luas wilayah 24,601 Km² terdiri dari 14 kelurahan
- Kec. Kota, luas wilayah 14,900 Km² terdiri dari 17 kelurahan
- Kec. Pesantren, luas wilayah 23,906 Km² terdiri dari 15 kelurahan

Ditengah Kota Kediri terdapat sungai Brantas yang mengalir dari arah selatan ke utara sepanjang 7 km sehingga seolah olah membelah Kota Kediri menjadi wilayah barat (Kecamatan Mojoroto) dan wilayah timur (Kecamatan Kota dan Pesantren), serta terdapat beberapa sungai yaitu:

- Sungai Kresek sepanjang 9 km terdapat di Kecamatan Pesantren
- Sungai Parang sepanjang 7,5 km terdapat di Kecamatan Mojoroto
- Sungai Kedak sepanjang 8 km terdapat di Kecamatan Mojoroto
 Terdapat sumber mata air (besar dan kecil) tersebar di 3 wilayah
 kecamatan antara lain: di kecamatan Mojoroto terdapat Sumber Lo,
 Sumber Pagendang, Sendang Kembar dan Sendang Ngembak, di
 kecamatan Kota Sumber Njimput di kelurahan Rejomulyo dan di
 kecamatan Pesantren terdapat Sumber Soyo, Gobang, Tlasah, Mojo
 (Kelurahan Bawang), Sumber Dadapan, Sumber Bulus, Sumber Jasem,
 Rempi, Cakarsi.

c) Demografi

Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pemerintah Kota Kediri, jumlah penduduk kota Kediri data pada tahun 2013 adalah 260.297 jiwa, yang terdiri dari 132.414 orang lakilaki dan 27.883 orang perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah Kota Kediri tahun 2013 tercatat 4.599 jiwa/km², dimana wilayah kecamatan yang berpenduduk paling padat adalah kecamatan Kota yaitu

5.701 jiwa/km². Jumlah penduduk secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah	Jumlah
		Laki-laki Perempuan		Penduduk	Kepala
					Keluarga
1	Mojoroto	51.447	48.177	99.624	31.239
2	Kota	42.521	42.421	84.942	27.742
3	Pesantren	38.446	37.285	75.731	20.048
Jun	ılah	132.414	127.883	260.297	79.029

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

d) Visi Pembangunan Kota Kediri

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah "Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi"

e) Misi Pembangunan Kota Kediri

- Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah Lingkungan
- Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan
- Misi 4: Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Kediri, Dinas Pertanian Kota Kediri berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi ke empat yaitu: Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif, dengan indikator kinerja:

- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
- Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
- Tingkat ketepatan penyelesaian rencana dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
- Peningkatan produktivitas tanaman padi
- Peningkatan produktivitas tanaman jagung
- Peningkatan produksi tanaman tebu
- Kelompok tani yang dibina
- Kelompok tani yang dibantu pemasarannya
- Kelompok tani yang dilatih untuk menerapkan teknologi
- Penyuluh yang mengikuti pelatihan
- Meningkatnya areal hutan yang direboisasi
- Jumlah pohon yang ditanam untuk reboisasi
- Peningkatan produksi peternakan
- Menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak
- Meningkatnya pemasaran produksi hasil peternakan
- Peningkatan produktivitas perikanan

f) Karakteristik Tanah dan Iklim

Kota Kediri memiliki jenis tanah aluvial, aluvial coklat kelabu dan mediteran, sesuai karakteristik jenis tanah tersebut memiliki sifat fisik diantaranya daya absorpsi tinggi, permeabilitas rendah dan kepekaan erosi besar sehingga perlu sistem drainase yang cermat. Kemiringan tanah pada posisi 0 – 2% terutama di kecamatan Kota, Pesantren sedangkan kecamatan Mojoroto sebagian wilayah yaitu kelurahan Pojok dan Sukorame posisi kemiringannya 3 – 40%.

Tabel 2 Luas Wilayah, Kemiringan dan Karakteristik Tanah di Kota Kediri Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kemiringan (Ha)				PH	Lapisan Olah
		(Km ²)	0-2%	2-15%	15-40%	>4-0%	Tanah	(Cm)
1	Mojoroto	24,601	1.875,46	288,75	126,22	169,57	6,0-6,5	20-40
2	Kota	14,900	1.490,00		3	-	6,0-6,5	20-40
3	Pesantren	23,903	2.390.30		7 0	-	6,0-6,5	20-40
	Jumlah	63,404	5.755,76	288,75	126,22	169,57	6,0-6,5	20-40

Sumber: BPS Kota Kediri

Curah hujan di kota Kediri mengalami perubahan tiap tahunnya, pada tahun 2011 hari hujan 76 hari rata-rata curah hujan 1.851 mm/hr dan pada tahun 2012 jumlah hari hujan 93 hari rata-rata curah hujan 1.470 mm/hr, pada tahun 2013 hari hujan 97 hari rata-rata hari hujan 1.683, dengan 4 bulan basah dan curah hujan terbesar pada bulan Januari dan Desember.

g) Lahan Menurut Ekosistem dan Penggunaanya

Kawasan lahan pertanian di kota Kediri dari tahun ketahun semakin berkurang memiliki kecenderungan beralih fungsi menjadi

lahan terbangun. Pada tahun 2012 luas baku sawah 2.280,47 Ha dan pada tahun 2013 luas baku sawah 2.170.503 Ha.

Tabel 3 Luas Baku Lahan Berdasarkan Kecamatan dan Penggunaannya di Kota Kediri Tahun 2013

	No	Keca- Matan	Peka- rangan/ Pe- rumahan	Sawah	Tegal	Hutan	Tanah Kosong	Lain	Jumlah
	1	Mojoroto	800.081	711.995	190,224	350.360	44.080	192790	2.460.100
	2	Kota	938.820	352.921	61,929	A 17	19.600	116730	1.490.000
1	3	Pesantren	984.296	1.105,587	282,145	1.200		187240	2.390.300
		Jumlah	2.723.199	2.170.503	534,298	351.560	63.680	496760	6.340.400

Sumber: BPS Kota Kediri

2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Kediri

a) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Kediri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri. Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

BRAWIJAYA

- Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu satu orang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang. Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Seksi Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengolahan Hasil.
- 4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - b. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan
- 5. Kepala Bidang Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Pembibitan, Pengembangan Budidaya Perikanan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri atas:
 - a. Rumah Potong Hewan dan
 - b. Balai Benih Ikan (BBI)
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- b) Visi Dinas Pertanian Kota Kediri

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Dinas Pertanian Kota Kediri harus berkarya agar konsisten dan dapat eksis serta produktif selaras dengan visi Pemerintah Kota Kediri. Visi pembangunan pertanian dalam arti luas di Kota Kediri dirumuskan sebagai berikut:

"Institusi Terdepan Dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian Tangguh dan Berwawasan Agribisnis".

Penjelasan makna visi:

Visi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan bahwa luasan penggunaan lahan yang semakin berkurang serta terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota.

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Institusi Terdepan dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang pertanian di lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Pertanian Tangguh dipahami sebagai pertanian yang dinamis dan ulet serta mampu bertahan dalam berbagai kondisi apapun, dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya Pertanian pada lingkungan fisik dan sosial tempat berpijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berwawasan Agribisnis adalah usaha tani dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang melingkupinya, diantaranya komponen input (masukan), produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Bukan hanya sekedar faktor produksi saja tetapi berfikir dari hulu sampai ke hilir, atau satu siklus usaha tani yang bertumpu pada kemandirian sumber daya petani dalam berbudidaya.

BRAWIJAYA

c) Misi Dinas Pertanian Kota Kediri

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah di tetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dapat mengenal Dinas Pertanian Kota Kediri dan mengetahui peran serta program-programnya dan juga hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang sesuai visi yang telah ditentukan. Untuk mencapai Visi tersebut di atas Dinas Pertanian mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi pertanian secara luas (tanaman pangan,
 perkebunan, peternakan dan perikanan) dengan menjaga
 kelestarian sumber daya alam (SDA);
- b. Meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dan profesionalisme aparat.

d) Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Kediri maka Dinas Pertanian menyusun tujuan strategis selama periode lima tahun kedepan untuk memberikan arahan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk sasaran yang akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dalam kurun waktu 2014 sesuai misi Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

Misi 1:Meningkatkan produksi pertanian secara luas (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dengan menjaga kelestarian sumber daya alam

Tujuan:

Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Sasaran: - Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

- Meningkatnya pemasaran tanaman pangan dan hortikultura
- 2. Meningkatknya produktivitas dan produksi hasil perkebunanSasaran: Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan
- 3. Meningkatnya produksi hasil hutan dan pelestarian hutan

Sasaran: - Terwujudnya perlindungan hutan dan sumberdaya alam

4. Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan dan kesehatan hewan

Sasaran: - Meningkatnya produksi hasil peternakan

- Meningkatnya kesehatan hewan dan kesmavet
- Meningkatnya pemasaran bahan asal ternak
- 5. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan

Sasaran: - Meningkatnya produktivitas perikanan

- Meningkatnya masyarakat yang melakukan budidaya ikan
- Meningkatnya luas lahan budidaya ikan
- Meningkatnya konsumsi ikan

Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dan profesionalisme aparat

Tujuan:

1. Revitalisasi Kelembagaan Pertanian

Sasaran: - Meningkatnya SDM Penyuluhan

Meningkatnya pemahaman petani terhadap teknologi budidaya, penggunaan pupuk dan sistem irigasi

Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian

Tujuan:

1. Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi

Sasaran: Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani

- e) Sumber Daya Manusia
 - 1) Pegawai Dinas Pertanian

Saat ini Dinas Pertanian memiliki 82 pegawai dengan perincian sebagai berikut:

Perincian Pegawai Dinas Pertanian Kota Kediri Tabel 4

Jenis kelamin (orang)	Golongan (orang)	Jabatan (orang)	Pendidikan (orang)
Laki-laki: 53 Perempuan: 29	Gol IV = 17 Gol III = 45 Gol II = 19 Gol I = 1	1. Struktural Eselon IIa = 1 Eselon IIIa = 1 Eselon IIIb = 3 Eselon IVa = 12 2. Fungsional = 14 3. Non Jabatan/Staf = 51	S2 = 13 S1 = 45 D3 = 3 D1 = 1 SMA = 19 SMP = 1

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Kota Kediri 2015-2019

Jenjang pendidikan dan disiplin ilmu dapat menggambarkan potensi sumber daya aparatur pegawai yang menjadi kekuatan bagi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi. Uraian mengenai jenjang pendidikan dan disiplin ilmu pegawai Dinas Pertanian Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Perincian Jenjang Kepangkatan Pegawai Dinas Tabel 5 Pertanian

No	Uraian	Jumlah Pegawai 2014	Jumlah Kebutuhan 2014-2019
1	Golongan IV	17	
2	Golongan III	44	A STORY
3	Golongan II	19	17.75
4	Golongan I	5	RAL.
5	Tenaga Honorer	13	
	Jumlah -//	98	0,

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Kota Kediri 2015-2019

2) Keragaan Penyuluh Pertanian

Jumlah penyuluh pertanian di kota Kediri sampai bulan Desember 2013 tercatat sebanyak 33 orang yang terdiri dari 14 orang penyuluh PNS dengan status jabatan 13 orang penyuluh pertanian ahli, 1 orang penyuluh pertanian trampil dan 2 orang penyuluh perikanan ahli, magang sebagai tenaga penyuluh pertanian sebanyak 2 orang dan tenaga harian lepas - tenaga bantu (THL-THB) penyuluh pertanian sebanyak 15 orang. Keberadaan penyuluh sesuai tugas dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Keberadaan Penyuluh Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Kediri Tahun 2013

No	Tugas/Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin		
		(orang)	Laki- laki	Perempuan	
1	Penyuluh pertanian	14	9	5	
2	Penyuluh perikanan	2	2		
3	THL-TB	15	10	5	
4	Magang	2	2		
Jun	nlah	33	23	10	

Sumber: Program Penyuluhan Pertanian Kota Kediri Tahun 2014

3) Keberadaan Kelompok Tani

Jumlah kelompok tani di wilayah kota Kediri tercatat 62 kelompok tani dengan perincian kelas kelompok yaitu kelas Pemula 32 kelompok, kelas Lanjut 25 kelompok, kelas Madya 2 kelompok dan kelas Utama 3 kelompok dan 9 kelompo tani wanita (belum dikukuhkan) sehingga jumlah kelompok tani 71 kelompok. Data keberadaan kelompok tani di wilayah kota Kediri, tersaji pada tabel berikut ini:

Keberadaan Kelompok Tani di Wilayah Kota Tabel 7 **Kediri Tahun 2013**

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani			Kelompok	Jumlah	
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Wanita	
1	Mojoroto	15	10	-	1	3	29
2	Kota	6	5	-	1	3	15
3	Pesantren	11	10	2	1	3	27
	Jumlah	32	25	2	3	9	71

Sumber: Program Penyuluhan Pertanian Kota Kediri Tahun 2014

4) Keberadaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) di wilayah kota Kediri pada tahun 2011 sebanyak 11 gapoktan, pada tahun 2013

bertambah menjadi 15 gapoktan dengan anggota 60 kelompok tani terinci pada 3 wilayah kecamatan.

5) Keberadaan Penyuluh Swadaya

Di kota Kediri terdapat penyuluh swadaya sebanyak 20 orang terinci kecamatan Mojoroto 13 orang, kecamatan Kota 3 orang dan kecamatan Pesantren 4 orang. Data keberadaan penyuluh swadaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Keberadaan Penyuluh Swadaya di Kota Kediri Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh Swadaya (orang)				
	A I	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Mojoroto	12/	1.0	13		
2	Kota	3	355	3		
3	Pesantren	4		4		
Jumlal	1 图示	19	1 3	20		

Sumber: Program Penyuluhan Pertanian Kota Kediri Tahun 2014

f) Keadaan Pertanian

1) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Keberadaan tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan di Kota Kediri tahun 2012 dan tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut:

BRAWIJAYA

Tabel 9 Jumlah Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Wilayah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013

No	Komoditi	Tahun 2012		Tahui	n 2013
	Marin	Luas (Ha)	Provitas	Luas	Provitas
			(Ton/Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)
1	Tanaman Pangan				ATTO I -
	Padi	1.555,00	6,45	2.095,00	6,70
	Jagung	919,00	6,75	938,00	6,70
	Kedelai	16,00	1,67	23,00	1,83
	Kacang Tanah	34,00	2,20	21,00	2,30
	Ketela Pohon	22,00	39,67	22,50	39,20
	Ubi Jalar	2,00	26,00	3,00	26,00
2	Holtikultura			A-A	
\mathbf{y}	Cabe besar	5,00	4,65	3,50	4,30
	Cabe kecil	3,00	5,00	4,20	4,20
	Sayuran lain	19,31	-	16,25	-
3	Tanaman)		
	perkebunan	5. (1)	~ 1		
	Tebu	1.408,064	86,50	1.600,302	67,69
	Kakao	2,00		2,00	-

Sumber: Program Penyuluhan Pertanian Kota Kediri Tahun 2014

Rencana luas tanam, luas panen dan produksi tanaman padi dan polowijo kota Kediri tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Rencana Luas Tanam, Luas Panen, Luas Produksi Tanaman Padi dan Polowijo di Kota Kediri Tahun 2014

No	Komoditi	Rencana tahun 2014				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)		
1	Padi	1.873	1.834	15.411		
2	Jagung	933	874	4.361		
3	Kedelai	25	24	26		
4	Kacang Tanah	19	16	33		
5	Ubi Kayu	24	22	766		

Sumber: Program Penyuluhan Pertanian Kota Kediri Tahun 2014

g) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Kediri untuk menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kota Kediri

	No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan
	1.	Gedung Kantor	2 Unit	1 Unit	1 Unit
ď	2.	Gedung dan Peralatan di UPTD BBI	1 Unit	1 Unit	
	3.	Gedung dan Peralatan di UPTD RPH	1 Unit	1 Unit	N Cart
4	4.	Gedung Klinik Pertanian	3 Unit	1 Unit	2 Unit
	5.	Gedung Balai Penyuluh Pertanian	3 Unit	1 Unit	2 Unit
	6.	Kendaraan Roda Dua	45 Unit	30 Unit	15 Unit
	7.	Kendaraan Roda Empat	6 Unit	3 Unit	3 Unit
Ĭ	8.	Truk	2 Unit	1 Unit	1 Unit
	9.	Meja Kursi Kerja	90 set	86 set	4 set
	10.	Meja Kursi Rapat	50 Buah	30 Buah	20 Buah
	11.	Meja Kursi Tamu	9 Set	7 set	2 set
	12.	Mesin Ketik	13 Unit	7 Unit	6 Unit
	13.	Komputer	35 Unit	19 Unit	17 Unit
	14.	Sambungan Telepon	5 Buah	3 Buah	2 Buah

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Kota Kediri 2015-2019

B. Penyajian Data

1. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kota Kediri

Peranan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas
Pertanian Kota Kediri dalam kaitannya dengan fokus penelitian dalam
mendukung pembangunan sektor pertanian, sebagai berikut:

- 1. Pembinaan
- 2. Koordinasi
- 3. Fasilitasi, dan
- 4. Pengawasan

- a) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
 - 1) Pembinaan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri kepada Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi contoh, teladan dan panutan bagi anggotanya agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjalin kerja sama yang baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Demikian juga dengan kepala Dinas Pertanian sebagai pimpinan pada kantor Dinas Pertanian, dituntut agar mampu menjadi panutan yang baik bagi semua pegawainya dalam setiap aspek kehidupannya. Demikian pernyataan bapak (HCP) selaku kepala Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap pembinaan yang telah diterapkan kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri:

"pembinaan yang dilakukan seperti salah satunya apabila ada aparat Dinas Pertanian yang mempunyai kemampuan, akan ditingkatkan ilmunya melalui mengikuti pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait dengan tugas pokoknya, supaya aparat Dinas Pertanian tersebut mempunyai kemampuan lebih setiap tahunnya. Dan apabila aparat Dinas Pertanian sudah mempunyai kemampuan yang lebih atau sudah mendapatkan ilmu yang banyak maka akan lebih mudah bagi aparat Dinas Pertanian tersebut untuk memberikan penjelasan terkait dengan pembangunan pertanian kepada masyarakat/petani" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Hal tersebut di pertegas oleh Koordinator Pokja Penyusunan Program dan Kelembagaan Bapak (KA), menurut beliau:

BRAWIJAYA

"bapak kepala sangat aktif memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada kami. Beliau selalu mengingatkan mengenai tugas pokok dan fungsi dari tiaptiap aparat di Dinas Pertanian ini. Beliau juga sangat terbuka, apabila ada masalah atau kendala kita selesaikan dengan diskusi, hal-hal yang sekiranya tidak baik segera di evaluasi bersama agar dapat segera ditangani" (wawancara, Senin, 27/10/2014. Pukul 10.27)

Dari pernyataan di atas, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala Dinas Pertanian dalam mengembangkan potensi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersifat pemberian bimbingan yaitu memberi arahan-arahan, memberi petunjuk, kepala Dinas Pertanian juga memberikan kesempatan untuk aparat melakukan konsultasi dalam bentuk pemberian penjelasan, memberi masukan kepada aparat. Dari data yang di dapat selama penelitian, bentuk pendidikan, pelatihan atau diklat yang dilakukan sebagai upaya pembinaan kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri dalam meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan seperti:

- 1. Pelatihan teknis petugas
- Pelatihan yang dilakukan oleh badan SDM pertanian (Departemen Pertanian)
- 3. Diklat dasar terampil
- 4. Diklat dasar ahli
- 5. Diklat teknis desa mandiri pangan
- 6. Diklat dasar fungsional
- 7. Diklat diversifikasi pangan

8. Diklat alih jenjang

9. Diklat alih kelompok

Dari hasil observasi di lapangan adapun bentuk pembinaan kepala Dinas Pertanian dalam memberikan contoh kedisiplinan terhadap aparat Dinas Pertanian berupa ketepatan waktu datang dan pulang, atribut kedinasan pada saat jam kerja, serta keberadaan di kantor pada saat jam dinas. Tentang ketepatan waktu hadir, baik itu datang dan pulang kantor, kepala Dinas Pertanian pada waktu-waktu tertentu seringkali juga dipengaruhi oleh adanya tugas atau kepentingan lain yang dilaksanakan pada waktu tersebut, sehingga kadangkala kepala Dinas Pertanian langsung menuju ke lokasi tugas dan atau pulang juga demikian.

Melihat kondisi tersebut, ketidakberadaan kepala Dinas di kantor pada saat jam kerja, juga disebabkan oleh adanya tugas lain, misalnya menghadiri undangan rapat dan mengurus sesuatu diluar kantor Dinas Pertanian. Hal ini pun penulis rasakan sendiri dimana penulis pada saat melakukan penelitian harus menunggu hingga beberapa jam atau beberapa hari untuk bisa bertemu dengan kepala Dinas Pertanian, karena kepala Dinas Pertanian harus menyelesaikan urusan di dalam daerah maupun di luar daerah seperti rapat dan lainlain. Dari beberapa hari melakukan observasi, penulis melihat adanya pengaruh kepala Dinas Pertanian ataupun sekertaris pada aparat/staf Dinas Pertanian dalam hal kedisiplinan keberadaan di

kantor pada saat jam kerja, keberadaan kepala Dinas Pertanian di kantor sangat mempengaruhi perilaku aparat/stafnya, dimana apabila kepala Dinas Pertanian tidak berada di kantor pada jam akhir hari kerja biasanya langsung di manfaatkan oleh sebahagian pegawai untuk pulang kantor tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

2) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri kepada Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan Petani

Pembinaan Dinas Pertanian terhadap masyarakat khususnya petani tentunya bukan hanya kepala Dinas Pertanian yang berperan, melainkan seluruh aparat di Dinas Pertanian dalam hal peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama petani akan pentingnya pembangunan pertanian Dinas Pertanian melakukan pembinaan-pembinaan, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri Bapak (HCP). Beliau mengungkapkan:

"pembinaan untuk masyarakat dilakukan melalui pelatihan kepada masyarakat. Supaya dapat mempengaruhi perilaku dari petani yang sebelumnya menggunakan cara tradisional menjadi semi modern sehingga para petani yang awalnya mempunyai pendapatan yang sedikit semakin lama pendapatannya dapat meningkat. Kita juga selalu mensosialisasikan ramah penggunaan energi yang lingkungan pupuk organik kepada petani, seperti permasalahan yang dihadapi apabila menggunakan bahan kimia secara terus menerus pun kita beritahukan" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13:15)

Hal tersebut juga dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kota Kediri ibu (S) , beliau mengungkapkan: "bimbingan secara rutin kepada petani telah dilakukan yang merupakan program kerja dari kelompok jabatan fungsional, melalui tenaga-tenaga PPL yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Kediri" (wawancara, Rabu, 05/11/2014. Pukul 09:26)

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi di kegiatan bimbingan atau pembinaan dari Dinas Pertanian ada berbagai cara yang di lakukan Dinas Pertanian Kota Kediri, seperti yang di ungkapkan oleh Koordinator Pokja Penyusunan Program dan Kelembagaan Bapak (KA), beliau mengungkapkan:

"dalam pembangunan pertanian partisipasi masyarakat sangat di butuhkan, tentunya kami perlu kerja keras melakukan penyadaran/pembinaan mengenai pembangunan itu sendiri, pembinaan yang dilakukan seperti sosialisasi, bimbingan/arahan, pidato, ceramah, maupun ransangan lain berupa percontohan akan bermanfaatnya pembangunan pertanian yang berorientasi pada lingkungan. Seringkali kami sosialiasikan bahwa resiko jangka panjang apabila terlalu sering menggunakan bahan kimia adalah merusak tanah dan ekosistem. Kesadaran petani akan hal ini masih sangat minim" (wawancara, Senin, 27/10/2014. Pukul 10:27)

Dari pernyataan diatas, Dinas Pertanian Kota Kediri sudah memberikan pembinaan yang baik melalui sosialisasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali kepada petani. Hal tersebut ditujukan untuk menyadarkan masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan juga menyadarkan akan pentingnya pembangunan pertanian yang tidak merusak lingkungan. Akan tetapi menurut sebagian dari pihak masyarakat, itu hanya pernyataan sepihak dari Dinas Pertanian berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan.

Menurut Bapak (PS) selaku koordinator dari kelompok tani Widyatani, mengungkapkan:

"secara umum pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri memang cukup baik tapi baiknya pembinaan belum tentu sudah memenuhi syarat daripada apa maksud petani. Sosialisasi akan pentingnya penggunaan pupuk organik ini masih sangat kurang bagi petani" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 14:39)

Peran Dinas Pertanian Kota Kediri dalam membina masyarakat dalam pembangunan pertanian dinilai tidak begitu besar karena pada umumnya pembinaan yang dilakukan tidak begitu sering dan kurangnya materi atau arahan. Pembinaan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang arti dari partisipasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan pertanian.

Menurut data yang didapat selama observasi dilapangan, bentuk pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri kepada Gabungan Kelompok Tani maupun Petani antara lain:

- Kegiatan SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu)
- 2. Demonstrasi plot/ percontohan budidaya sayuran dalam pot secara organik
- 3. Pertikultur
- 4. Pelatihan teknis agribisnis tanaman padi
- 5. Pelatihan teknis agribisnis tanaman kedelai

- Pelatihan pembuatan pestisida nabati di Sampoerna
- pelatihan pembuatan pupuk organik 7.
- Pelatihan teknologi produksi padi hibrida 8.
- 9. Pelatihan teknik budidaya padi hibrida
- 10. Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan agribisnis
- 11. Pelatihan HIPA (Himpunan petani pemakai air)
- 12. Pelatihan peningkatan peran wanita tani
- 13. Pelatihan kelembagaan tani pada kelurahan berhasil dan kota sehat
- 14. Pelatihan olahan produksi pertanian
- 15. Pelatihan agensia hayati
- 16. Karyawisata/studi banding untuk melihat keberhasilan pertanian di daerah lain untuk diadopsi di Kota Kediri

Dari data diatas dapat digambarkan bahwa pihak Dinas Pertanian Kota Kediri sangat aktif dalam meningkatkan wawasan gabungan dan petani melalui pelatihan-pelatihan kelompok pembinaan-pembinaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian

1) Koordinasi Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri dengan aparat Dinas Pertanian Kota Kediri

Koordinasi yaitu suatu upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna (PP. No. 6 tahun 2008). Hasil wawancara dengan Bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri sebagai berikut:

"saya dengan aparat selalu diskusi, selalu mengingatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar mereka tidak salah pada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selalu ada rapat setiap bulan, apa yang telah dikerjakan oleh aparat kita adakan rapat evaluasi, apabila ada permasalahan di lapangan kita diskusikan, kita pecahkan bersama. Rapat evaluasi di selenggarakan tiap satu bulan sekali tergantung ketidak sibukan pekerjaan, pokoknya ada waktu kita rapat, kita adakan monitoring dan evaluasi. Monitoring seperti mengadakan survey apakah ada hambatan di lapangan, apakah ada masalah dan lain-lain." (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Diakui oleh Ibu (S) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kota Kediri:

"koordinasi memang sudah dilaksanakan dengan baik. Kita selalu rapat koordinasi yang rutin itu setiap bulan tetapi setiap minggu kita mengevaluasi dengan ada rapat koordinasi dengan kepala bidang dan kita lanjutkan di bidang masing-masing lalu dilanjutkan menyampaikan kepada kepala seksi" (wawancara, Rabu, 05/11/2014. Pukul 09:26)

Dari hasil observasi di lapangan, fungsi koordinasi Kepala Dinas Pertanian dengan aparat Dinas Pertanian Kota Kediri dalam setiap pelaksanaan program kegiatan di lakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi program yang telah dilaksanakan. Dari data yang di dapat dari hasil wawancara dengan informan mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri dengan aparat Dinas Pertanian Kota Kediri bersifat rapat kerja, rapat koordinasi, permintaan penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang umumnya di lakukan dengan cara mengundang untuk datang dalam suatu forum. Dengan demikian, maka koordinasi sangat penting dilakukan dalam proses perencanaan. Diungkapkan Bapak (KA) selaku Koordinator Pokja Penyusunan Program dan Kelembagaan sebagai berikut:

"koordinasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan maupun program selalu di lakukan, dengan harapan tidak akan ada masalah kesalahpahaman ataupun kesalahan informasi sehingga tidak akan ada pihak yang saling menyalahkan. Koordinasi itu cukup mudah dilakukan karena setiap pagi semua aparat Dinas Pertanian datang untuk apel pagi. Hal ini cara singkat kami untuk koordinasi" (wawancara, Senin, 27/10/2014, pukul 10:27)

Dari pernyataan diatas, terbukti bahwa koordinasi sangat wajib dilakukan karena adanya kesadaran dari pelaksana teknis kegiatan untuk menghindari masalah-masalah yang timbul akibat adanya kurang komunikasi. Koordinasi sangat mudah dilakukan karena kantor Dinas Pertanian masih satu atap tidak terpisah-pisah,

kepala Dinas Pertanian juga sangat mudah apabila ingin berkoordinasi/berinteraksi dengan aparat/staf-staf Dinas Pertanian Kota Kediri, kemungkinan bertemu dalam kantor sanga tinggi. Menurut pernyataan kepala Dinas Pertanian Kota Kediri koordinasi biasa di lakukan melalui media elektronik seperti *hand phone* (HP), telepon kantor, maupun bertemu secara langsung.

2) Koordinasi Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan Petani

Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dengan Gabungan Kelompok tani dan petani menurut pernyataan bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri, sebagai berikut:

"....kalau koordinasi dengan petani, petani mempunyai kelompok tani maupun gabungan kelompok tani, mereka selalu berdiskusi, mereka selalu di datangi kita setiap saat mereka butuh kita. Setiap kita butuh, kita selalu datang ke mereka. Kegiatan seperti ini rutin. Setiap bulan kita pasti bertemu dengan petani, kita bahas apa yang mereka permasalahkan, dan ini berpindah pindah dari tiap-tiap kecamatan jadi tiap kecamatan rata perlakuannya. Apabila petani ada masalah dan tidak bisa rapat maka bisa telepon. Kita berkomunikasi dengan petani juga dengan telpon. Jadi mereka merasa termudahkan". (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Koordinasi Dinas Pertanian dengan petani dan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) menurut pernyataan Bapak (PS) selaku koordinator dari kelompok tani Widyatani, menurutnya:

"setahu saya koordinasi itu cukup sering dilakukan. Karena pada intinya tujuan koordinasi supaya tidak ada kesalahan informasi antara pihak Dinas Pertanian dengan kami para petani dalam menjalankan suatu kegiatan" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 14:39)

Dari data yang didapat selama observasi di lapangan bentuk koordinasi yang di lakukan Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap Gabungan Kelompok Tani dan petani yaitu malakukan rapat kerja, memberikan kesempatan untuk konsultasi kepada pihak Dinas Pertanian maupun memberikan informasi-informasi mengenai program kegiatan yang akan di laksanakan, pertemuan kelompok, pendampingan dalam musrembang, pertemuan KTNA tingkat kecamatan, pertemuan insidentil (sesuai kebutuhan petani). Pentingnya suatu koordinasi diakui oleh beberapa informan sangat penting dilakukan, karena koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan koordinasi kepada petani, Dinas Pertanian Kota Kediri menerapkan dalam keseluruhan proses pembangunan pertanian sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai kepada evaluasinya, jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

c) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam Mendukung Pembangunan Pertanian

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan fasilitas yang diberikan pemerintah memang sangat dibutuhkan seperti halnya pemberian

informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan serta fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang ada di Dinas Pertanian.

1) Fasilitasi Dinas Pertanian kepada aparat Dinas Pertanian

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari pemberian pelayanan yang berupa fasilitasi demi kemudahan melakukan suatu kegiatan. Demikian pernyataan dari bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri:

"minimal sepeda motor, semua diberi sepeda motor jadi tidak ada alasan tidak dapat bertemu dengan petani. Aparat sudah di beri kendaraan dinas plat merah sudah menjadi kewajibannya untuk melayani keperluan petani. Mereka pun di beri dana, mau berkumpul dengan petani ada dananya. Selain kendaraan untuk datang kepada petani, aparat mengumpulkan petani juga ada dananya, untuk pelatihan ada juga." (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Dari pengamatan yang diambil selama observasi, bentuk fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri yaitu:

- Honorarium petugas yang terkait dengan operasional satuan kerja
- Pengadaan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan-laporan dalam berbagai bentuk formulir pelaporan
- Biaya perjalanan dalam rangka koordinasi
- Kendaraan dinas

Menurut pengamatan tersebut terbukti bahwa aparat Dinas Pertanian Kediri memang sangat difasilitasi demi kemudahan-kemudahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya jadi mereka tidak akan mangkir dengan alasan tidak adanya fasilitasi dari Dinas Pertanian Kota Kediri

2) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam pelayanan kepada masyarakat (petani) dan Gapoktan

Dalam mempermudah kegiatan petani Dinas Pertanian Kota Kediri memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang dapat membantu petani. Demikian pernyataan dari Bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri:

"kemudian fasilitas kepada petani misalnya petani butuh mesin potong padi, kita kasih mesin potong padi. Petani butuh pompa air pada saat kemarau seperti sekarang, kita kasih bantuan pompa air. Dan ini diberikan tiap kelompok tidak mungkin kan kita kasih perorangan. Jadi kepada masyarakat seperti itu fasilitasi bantuan-bantuannya. Apa yang dibutuhkan oleh petani kita serap kemudian kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi ya bukan yang sifatnya kecil-kecil minta, tentunya yang besar-besar yang mereka kesulitan untuk membeli" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Dari data dan hasil observasi yang di dapat selama penelitian bentuk fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam hal pelayanan khususnya mengenai pembangunan sektor pertanian yaitu pemberian rekomendasi mendapatkan bantuan, seperti bantuan pupuk, bantuan dana, bantuan alat berat, bantuan benih padi, bantuan benih jagung, bantuan buku-buku administrasi kelompok, serta persetujuan pembentukan kelembagaan kelompok tani. Tanggapan masyarakat mengenai hal bantuan yang diberikan oleh Dinas

Pertanian Kota Kediri dinyatakan oleh Bapak (PS), selaku koordinator dari kelompok tani Widyatani:

"pelayanan, fasilitasi atau bantuan yang di berikan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri saya rasa cukup baik. Aparat Dinas Pertanian juga merespon kebutuhan-kebutuhan kita. Namun terkadang, menurut saya aparat Dinas Pertanian sangat berbelit-belit dalam melayani masyarakat khususnya petani" (wawancara, Senin, 03/11/2014, pukul 14:39)

Pada dasarnya komunikasi yang baik dengan masyarakat akan membuat suasana pelayanan menjadi menyenangkan, dimana masyarakat merasa mendapatkan respon yang baik dari aparatur melalui komunikasi yang baik. Namun demikian ternyata dalam kondisi tertentu aparat Dinas Pertanian Kota Kediri kurang informatif dalam berhubungan dengan masyarakat.

Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sehingga pengelolaan pembangunan dapat dilaksanakan secara transparan, responsif dan dapat dipertanggung jawabkan khususnya dalam menyusun rencana pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat dan kemitraan serta aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan tersebut dimulai di tingkat kelurahan yang biasa kita kenal dengan musrenbang tingkat desa/kelurahan, kemudian diteruskan dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang biasa disebut musrenbang tingkat kecamatan.

Tujuan dilaksanakannya musrenbang tingkat kecamatan adalah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat kecamatan serta sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan tingkat Kota. Pernyataan Ibu (S) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kota Kediri mengenai penyelenggraan musrembang:

"melalui kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan, maupun Kota, Dinas Pertanian mampu memberikan segala informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat petani tentang segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan" (wawancara, Rabu, 05/11/2014. Pukul 09:26)

Dari data hasil observasi pada pelaksanaan musrembang tingkat Kecamatan aparat Dinas Pertanian sebagai pendamping Gabungan Kelompok Tani dan petani yang mampu menyediakan dan siap dengan informasi-informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan program, dalam hal ini harus mampu menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran atau nasehat yang kongkrit dan realistis agar mudah diterapkan. Aparat Dinas Pertanian seringkali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program. Aparat Dinas Pertanian sebagai pendamping harus mampu mengartikan materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat serta mudah diterapkan tahap demi tahap.

- d) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
 - 1) Pengawasan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap aparat Dinas Pertanian

Pengawasan terhadap aparat Dinas Pertanian Kota Kediri merupakan langkah awal demi tercapainya kedisiplinan. Berikut pernyataan Bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri:

> "mengenai pengawasan mungkin pada setiap jam masuk kerja, setiap hari apel pagi kita, yang tidak apel ditegor. Pasti ditanya kenapa tidak apel, kenapa terlambat, kenapa tidak masuk. Apabila dilakukan berulang kali, berturut-turut dalam setahun ya di pecat, ada aturannya. Pulangnya pun sama." (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Kegiatan monitoring/pengawasan dan evaluasi kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparat Dinas Pertanian Kota Kediri
- 2. Mengetahui tingkat kemajuan aparat Dinas Pertanian Kota Kediri dalam suatu kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk evaluasi

Menurut hasil observasi di lapangan, pada dasarnya apabila ada pengawasan pasti ada evaluasi. Monitoring atau pengawasan dan evaluasi merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan satuan kerja,

terutama mengenai bagaimana penggunaan dan pencapaian sasaran dari kinerja.

2) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian

Pengawasan Dinas Pertanian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sudah sering dilakukan, seperti pernyataan Bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri. Beliau mengatakan:

"mengenai pengawasan kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian ini otomatis kita awasi. Sekarang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pertanian kita lihat terus, kita pantau terus. Bermanfaat atau tidak, digunakan betul atau tidak. Apabila tidak digunakan dengan baik ataupun disalahgunakan ya kita tarik. Daripada di suatu kelompok tidak digunakan tapi kelompok lain butuh, ya mending kita berikan kelompok kepada membutuhkan. Mengenai pengawasan terhadap pupuk itu sudah ada program namanya pupuk berimbang, itu kita awasi tetapi tetap kita hanya bisa menyarankan karena bukan milik kita tapi kita beritahu resikonya. Tiap pertemuan kepada petani sudah kita sampaikan bagaimana resiko kedepannya apabila petani tidak menggunakan pupuk kerusakan lahan pun kita sesuai ketentuan. Resiko beritahukan agar petani dapat tersadar" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Kediri merupakan salah satu langkah agar program/kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana pernyataan oleh

Bapak (KA) selaku Koordinator Pokja Penyusunan Program dan Kelembagaan, seperti berikut:

"pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian umumnya seperti melakukan pengamatan secara pribadi, menerima laporan lisan dari petani maupun aparat, menerima laporan tertulis dari petani maupun aparat. Kita selalu mengevaluasi setiap kegiatan yang ada di lapangan, selalu kita adakan pemeriksaan terhadap perkembangan kegiatan yang kita selenggarakan. Kami juga menerima masukan dari petani atau gabungan kelompok tani. Jadi apabila ada permasalahan dapat segera kami diskusikan pemecahannya. (wawancara, Senin, 27/10/2014. Pukul 10:27)

Dari pernyataan diatas, pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di Dinas Pertanian Kota Kediri sebagai sasaran dari kebijakan yang dilakukan. Dari data yang didapat selama penelitian bentuk pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri khususnya dalam pembangunan di sektor pertanian sebagai berikut:

- Pengawan pembangunan fisik,
- Pengawasan penggunaan pupuk,
- Pengawasan penggunaan pestisida
- Pengecekan pupuk,
- Pengawasan hama penyakit tanaman
- Pengecekan harga,
- Pengawasan dan evaluasi kegiatan usaha tani, dan
- Pemantauan penggunaan anggaran tiap tahun.

Mengenai pengawasan terhadapa bantuan yang di berikan kepada Gabungan Kelompok Tani dan petani pernyataan Ibu (S) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kota Kediri;

"pengawasan terhadap bantuan yang di berikan kepada Gabungan Kelompok Tani dan petani pada umumya seperti pengawasan terhadap pembangian air, pengawasan terhadap penerima bantuan pupuk dan lain-lain yang bertujuan untuk mewujudkan daya guna, hasil guna dan tepat guna dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di dalam program-program pemerintah, Jika bantuan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dengan kata lain tidak sampai pada sasaran bisa saja jatah selanjutnya tidak di berikan lagi, maka dari itu perlu ada pengawasan dari berbagai pihak juga" (wawancara, Rabu, 05/11/2014. Pukul 09:26)

Pendekatan dalam pengawasan dilakukan secara pribadi terhadap pelaksana teknis ketika melaksanakan pekerjaannya. Pendekatan lain melalui laporan lisan yang dilakukan melalui wawancara ataupun rapat dengar pendapat atau diskusi yang mendalam baik secara formal maupun informal. Laporan lisan dilakukan untuk suatu keadaan yang mendesak dan dirasa penting oleh lembaga pengawas. Sedangkan laporan tertulis merupakan bukti resmi pelaksanaan kegiatan dan dijadikan dokumen penilaian akhir tahun kegiatan yang dilakukan oleh kepala Dinas Pertanian dengan aparaturnya.

Dari hasil observasi di lapangan, Dinas Pertanian melakukan pengawasan dengan cara pemeriksaan, salah satu bentuk pengawasan dalam implementasi kebijakan publik adalah pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan suatu tindakan yang lebih bersifat intensif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan

masih pada jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan sangat penting untuk menghindari kesalahan pelaksanaan kegiatan berikutnya yang akan berdampak pada tahap-tahap berkonsekuensi terhadap aspek waktu, biaya dan yang terpenting adalah citra dari lembaga yang diperiksa. Evaluasi merupakan penilain hasil kerja lembaga pelaksana untuk mengetahui hasil yang dan sebagai dasar tindakan selanjutnya untuk menyempurnakan kegiatan selanjutnya. Evaluasi harus dilakukan secara obyektif untuk menjamin tingkat kinerja serta kepuasan bagi lembaga pelaksana. Tindakan korektif adalah langkah selanjutnya dalam pangawasan yang di lakukan Dinas Pertanian Kota Kediri, karena tindakan korektif merupakan perbaikan atau penyempurnaan kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses kegiatan. Tindakan ini dapat dilaksanakan segera setelah ditemukannya kesalahan yang disertai pemberian arahan maupun penyempurnaan terhadap rencana, peraturan dan sebagainya, demi efektivitas dan efisiensi.

2. Pembangunan Pertanian Berbasis Green Economy di Kota Kediri

a) Penggunaan energi yang ramah lingkungan dalam pembangunan pertanian melalui sistem pertanian organik

Penggunaan energi yang ramah lingkungan sangat diperlukan, selain untuk keberhasilan pertanian, penggunaan energi yang ramah lingkungan juga untuk membuat pembangunan pertanian tanpa merusak

BRAWIJAYA

alam. Seperti yang dikatakan oleh Bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri sebagai berikut:

"pemerintah terus membina, tentunya di pemerintahan saya ini saya minta tanah seluas satu hektar untuk dijadikan tempat uji coba memakai energi yang ramah lingkungan seperti pupuk organik. Dengan cara seperti ini dapat membuat pembangunan pertanian yang ramah lingkungan tanpa merugikan alam sekaligus membuat petani yakin bahwa dengan penggunaan energi yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik banyak kelebihan-kelebihan yang dapat didapatkan tanpa merusak alam" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Tanggapan petani mengenai bentuk dukungan penggunaan energi yang ramah lingkungan dalam pertanian yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri dinyatakan oleh Bapak (PS), selaku koordinator dari kelompok tani Widyatani:

"memang betul sosialisasi mengenai penggunaan pupuk organik sangat gencar di sosialisasikan. Namun sosialisasi yang diberikan kepada kami tentu saja tidak mudah kami lakukan, butuh proses. Terkadang para petani seperti kami masih belum yakin, belum mau dan bahkan belum mampu menerapkan suatu inovasi baru/teknologi baru" (wawancara, Senin, 03/11/2014, pukul 14:39)

Pendekatan *green economy* dalam pertanian menjamin terpeliharanya hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan fungsi lingkungan dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dalam pertanian. Sesuai dengan hasil observasi dilapangan bentuk dukungan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan sebagai upaya pembangunan pertanian berbasis *green economy* antara lain:

1. Sosialisasi penggunaan pupuk organik

- 2. Sosialisasi penggunaan pestisida botani
- 3. Agensia hayati
- 4. Penerapan teknologi budidaya sesuai rekomendasi
- 5. Membuat percontohan-percontohan tanaman yang berhasil menggunakan pupuk organik
- 6. Sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu
- 7. Memberikan bantuan benih saprodi
- 8. Pembinaan pertanian berkelanjutan
- 9. Monitoring terhadap penggunaan pupuk dan pestisida sehingga tidak merusak lahan.

Menurut data yang didapat selama observasi dalam pelaksanaannya, sistem pertanian organik sangat memperhatikan kondisi lingkungan dengan mengembangkan metode budi daya dan pengolahan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Sistem pertanian organik diterapkan berdasarkan atas interaksi tanah, tanaman, hewan, manusia, mikroorganisme, ekosistem, dan lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan dan keanekaragaman hayati. Sistem ini secara langsung diarahkan pada usaha meningkatkan proses daur ulang alami daripada usaha merusak ekosistem pertanian (agroekosistem).

Pertanian organik banyak memberikan kontribusi pada perlindungan lingkungan dan masa depan kehidupan manusia. Pertanian organik juga menjamin keberlanjutan bagi agroekosistem dan kehidupan petani sebagai pelaku pertanian. Sumber daya lokal

dipergunakan sedemikian rupa sehingga unsur hara, biomassa, dan energi bisa ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah pencemaran. Pemanfaatan bahan-bahan alami lokal di sekitar lokasi pertanian seperti limbah produk pertanian sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik seperti kompos sangat efektif mereduksi penggunaan pupuk kimia sintetis yang jelas-jelas tidak ramah lingkungan. Demikian juga dengan pemanfaatan bahan alami seperti tanaman obat yang ada untuk dibuat racun hama akan mengurangi penggunaan bahan pencemar bahaya yang diakibatkan pestisida, fungisida, dan insektisida kimia.

Penggunaan mikroorganisme pada pembuatan pupuk organik, selain meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, juga akan mengurangi dampak pencemaran air tanah dan lingkungan yang timbul akibat pemakaian pupuk kimia berlebihan. Di samping itu, banyak mikroorganisme di alam yang memiliki kemampuan mereduksi dan mendegradasi bahan-bahan kimia berbahaya yang diakibatkan pencemaran dari bahan racun yang digunakan dalam aktivitas pertanian konvensional seperti racun serangga dan hama. Dengan kemajuan teknologi, pertanian organik adalah pertanian ramah lingkungan yang murah dan berteknologi sederhana (tepat guna) dan dapat dijangkau semua petani di Indonesia. Serangga hama dan musuh alami merupakan bagian keanekaragaman hayati. Serangga hama memiliki kemampuan berbiak yang tinggi untuk mengimbangi tingkat kematian yang tinggi di

alam. Keseimbangan alami antara serangga hama dan musuh alami sering dikacaukan penggunaan insektisida kimia yang hanya satu macam. Pertanian organik bukan hanya baik bagi kesehatan, tetapi baik juga bagi lingkungan bumi.

b) Pencegahan pencemaran lingkungan akibat proses produksi pertanian

Resiko yang pasti dengan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan adalah kerusakan lingkungan. Sekarang ini Dinas Pertanian sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi agar menggunakan energi yang ramah lingkungan agar pencemaran lingkungan akibat proses produksi pertanian dapat dihindari. Seperti pernyataan Bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri berikut ini:

"pencegahan pencemaran lingkungan seperti penggunaan zat kimia, tugas kita memberikan penerangan kepada mereka. Yang terus kita sosialisasikan dalam hal ini yaitu apabila mereka petani sudah menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti pupuk organik maka tidak akan ada yang namanya pencemaran lingkungan. Sekarang ini juga sudah ada obat-obat yang tidak menggunakan bahan kimia sehingga lingkungan tidak akan tercemar. Kita sudah sosialisasikan kepada petani mengenai obat-obat penghilang hama yang tanpa menggunakan bahan kimia. Tetapi masyarakat terkadang masih belum percaya. Kepedulian terhadap lingkungan pun petani masih sangat kurang maka dari itu sekarang sedang kita gencarkan penggunaan energi yang ramah lingkungan" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Menurut hasil observasi di lapangan, pencemaran lingkungan dalam pertanian sebagian besar diciptakan dari penggunaan pestisida. Pestisida yang banyak digunakan biasanya merupakan bahan kimia toksikan yang unik, karena dalam penggunaannya, pestisida

ditambahkan atau dimasukkan secara sengaja ke dalam lingkungan dengan tujuan untuk membunuh beberapa bentuk kehidupan. Idealnya pestisida hanya bekerja secara spesifik pada organisme sasaran yang dikehendaki saja dan tidak pada organisme lain yang bukan sasaran. Tetapi kenyataanya, kebanyakan bahan kimia yang digunakan sebagai pestisida tidak selektif dan malah merupakan toksikan umum pada berbagai organisme, termasuk manusia dan organisme lain yang diperlukan oleh lingkungan (Keman, 2001).

Bentuk pencegahan pencemaran lingkungan menurut hasil observasi di lapangan antara lain:

- 1. Pengelolaan pestisida
- 2. Pengawasan terhadap penggunaan pestisida
- 3. Pengawasan terhadap penggunaan pupuk
- 4. Pengawasan hama penyakit tanaman
- 5. Sosialisasi pestisida botani
- 6. Agensia hayati

Menurut salah satu informan, penggunaan pestisida di bidang pertanian yang merupakan salah satu upaya untuk peningkatan produk pertanian ini tidak akan menimbulkan masalah apabila sesuai dengan aturan yang diperbolehkan. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c) Mendorong pertumbuhan dan kualitas pertanian

Di setiap kegiatan sosialisasi selalu diberitahukan bahwa pertumbuhan dan bagaimana kualitas pertanian selalu dipantau oleh pemerintah. Jangan sampai ada produksi yang buruk beredar di lingkungan masyarakat. Seperti pernyataan Bapak (HCP) selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri, beliau mengatakan:

"dalam hal pendorong pertumbuhan dan kualitas pertanian jelas kita lakukan. Kita beritahu petani bagaimana cara menanam yang baik, penggunaan pupuk yang baik, dan lainlain supaya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Semua ilmu yang kita miliki terkait dengan hal ini kita sampaikan kepada petani supaya hasilnya benar-benar dapat bersaing dengan produk lainnya. Bagaimana cara menyimpan hasil panen yang baik pun kita sampaikan. Tujuanya ya tentu untuk kualitas dari produksi itu sendiri. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dari pemerintah, petani maupun konsumen nantinya" (wawancara, Senin, 03/11/2014. Pukul 13.15)

Bentuk upaya mendorong pertumbuhan dan kualitas pertanian Dinas Pertanian Kota Kediri antara lain:

- 1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
- 2. Pengelolaan sumber daya air
- 3. Pengendalian organisme pengganggu tanaman
- 4. Pemantauan bencana alam dan kekeringan
- 5. Pengembangan benih
- 6. Pengembangan sarana dan prasarana lahan
- 7. Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran
- 8. Pengembangan usaha pertanian

- Peningkatan penerapan pupuk pada tanaman pangan holtikultura
- 10. Peningkatan dan penguatan kelembagaan petani pertanian tanaman pangan dan holtikultura
- 11. Peningkatan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi pengolahan
- 12. Informasi pasar

Selain tersebut diatas, pengendalian hama terpadu (PHT) yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri adalah suatu cara pengendalian yang memadukan beberapa cara pengendalian yang lebih diarahkan pada cara yang berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek, yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan teknis. Sehingga akan menghasilkan produk aman konsumsi dan ramah lingkungan (environmental friendly).

C. Pembahasan

- 1. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di kota Kediri
 - a) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
 - 1) Pembinaan kepala Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap aparat
 Dinas Pertanian Kota Kediri

Pembinaan yang dilakukan kepala Dinas Pertanian kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri dalam memberi arahan bawahan untuk ikut mendukung pembangunan di sektor pertanian sudah di lakukan dengan baik, dengan cara membimbing, memberi arahan, memberi petunjuk kepada aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan sehingga telah menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan cakap di bidang tugasnya. Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri juga selalu mencoba menjadi teladan yang baik bagi aparatnya. Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri ini diharapkan aparat-aparat Dinas Pertanian Kota Kediri dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri nomor 60 tahun 2008 pasal 6 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kepala Dinas mempunyai tugas:

- Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
- Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri kepada Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan Petani

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri kepada Gabungan Kelompok Tani dan petani sudah dilakukan dengan baik. Pada dasarnya keberhasilan program pembangunan pertanian telah didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui kegiatan pembinaan dengan pendekatan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani agar mampu mengelola usaha taninya secara profesional dan berwawasan agribisnis. Pembinaan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri melalui pendekatan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani bertujuan agar gabungan kelompok tani dan petani mampu melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan usaha tani yang berbasis green economy yaitu kegiatan perekonomian tanpa merusak lingkungan dan kegiatan pertanian berbasis agribisnis yang

selanjutnya dapat menjadikan kelembagaan petani menjadi kuat dan mandiri. Hasil dari pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani adalah terbinanya gapoktan dan petani dalam memperkuat manajemen kelembagaan petani.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 120/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Nomor Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Kompetensi Petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan pelatihan kepada petani. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan pada lembaga diklat yang terakreditasi, sedangkan permagangan petani diselenggarakan pada lembaga diklat yang terklasifikasi dan/atau perorangan petani maju. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani, meliputi Pelatihan Bidang Pertanian dan Permagangan Bidang Pertanian. Pelatihan dilaksanakan untuk memenuhi kekurangan kompetensi kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja sebagai tuntutan pekerjaan/profesi.

b) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian

1) Koordinasi Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri dengan aparat Dinas Pertanian Kota Kediri

Kota Kediri dengan aparat Dinas Pertanian Kota Kediri sebagai upaya dalam kemudahan melakukan suatu kegiatan sudah berjalan dengan baik dan maksimal terbukti dengan adanya kesadaran dari pelaksana teknis kegiatan untuk menghindari masalah-masalah yang timbul akibat adanya kurang komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik akan timbul kemudahan-kemudahan dalam setiap kegiatan baik yang sedang dilakukan, atau kegiatan yang belum dilakukan, maupun kegiatan yang akan dilakukan.

Secara garis besar koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefesien mungkin (Siagian, 2012). Hakikat dari koordinasi adalah menyatukan kegiatan-kegiatan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkutpautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja.

Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, koordinasi diartikan sebagai suatu upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna.

2) Koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dengan Gabungan Kelompok Tani dan Petani

Pelaksanaan koordinasi Dinas Pertanian Kota Kediri dengan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan petani sudah baik dilakukan. Koordinasi ini dimaksudkan agar para gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani dapat mempresentasikan kegiatan dan permasalahan yang dialami dilapangan yang pada akhirnya akan memberikan solusi terbaik bagi petani. Disamping itu dengan kegiatan ini diharapkan petani dapat mendapatkan informasi-informasi penting dan terbaru mengenai pertanian. Kegiatan pembangunan pertanian tidak dapat terlepas dari peran Dinas Pertanian dengan petani. Dinas Pertanian Kota Kediri dan petani diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik dan koordinasi yang baik sehingga dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian hasilnya akan sesuai dengan harapan.

Koordinasi erat kaitannya dengan kepemimpinan. Soewarno dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003:311) mengemukakan bahwa

BRAWIIAYA

koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan sebab koordinasi dan kepemimpinan (leadership) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi. Dalam hubungannya dengan proses pembangunan, baik pada skala nasional dan skala lokal, peran kepemimpinan dipegang oleh pemerintah, ini wajar karena pemerintah merupakan komponen negara yang memiliki otoritas (kewenangan) dengan segala acuan dan regulasi Dengan demikian koordinator pembangunan pada yang sah. dasarnya adalah pemerintah. Pemerintah menjadi agent of change dari Agent of Development (agent perubahan dan perubahan berencana). Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaankebijaksanaan, program-program dan proyek-proyek. Dalam perencanaan peran perencana dan penganggaran dimaksud untuk memobilisasi dana disalurkan pada program-program pembiayaan pada prioritas pembangunan.

Koordinasi pembangunan sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah, (2003:312) bahwa (1) koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai suatu konsekwensi logis dari adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda, (2) aktivitas yang berbeda juga membawa konsekwensi logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula, (3) ada institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, (4) koordinasi merupakan alat

sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses pembangunan sehingga akan tercipta suatu aktivitas yang harmonis, sinergis dan serasi untuk menciptakan tujuan bersama.

- c) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam Mendukung Pembangunan Pertanian
 - 1) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri

Fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri merupakan bentuk dukungan dan bentuk kesamaan gerak atau keselarasan terhadap kemudahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap pegawai. Dari pemberian fasilitasi kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap terlaksananya kegiatan-kegiatan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai perlu dilakukan pendekatan dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis yang umumnya melekat pada diri pegawai seperti motivasi, ketenangan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja apabila tersedia fasilitas kerja yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam menjalankan tanggungjawab bekerja.

Fasilitas berasal dari bahasa Belanda yaitu *faciliteit* yaitu prasarana untuk mempermudah melakukan sesuatu. Apabila dihubungkan dengan pekerjaan maka fasilitas dapat berarti sebagai alat untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan.

2) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam pelayanan kepada Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan petani

Kegiatan Fasilitasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri kepada Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan petani bertujuan untuk menunjang atau mengembangkan penerapan teknologi inovatif pada pertanian/sentra agribisnis, dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur yang mendukung terwujudnya suatu kegiatan yang efektif dan efisien serta bersifat mendukung upaya pemantapan pembangunan pertanian yang akan dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari tingkat nasional sampai ke lokasi-lokasi sentra yang paling kecil. Dalam kegiatan pembangunan pertanian peran aparat Dinas Pertanian Kota Kediri diperlukan sebagai pendamping dan pembimbing. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat Dinas Pertanian Kota Kediri bertindak sebagai fasilitator.

Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan baik tenaga, dana, peralatan, dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan upaya memberi kemudahan. Fasilitasi menjadi

inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan fasilitas yang diberikan pemerintah memang sangat dibutuhkan seperti halnya pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan serta fasilitas pendukung (sarana dan prasarana).

- d) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian
 - 1) Pengawasan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap aparat Dinas Pertanian Kota Kediri

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri telah berjalan efektif. Penyimpangan atau kesalahan yang terjadi telah diminimalisir sehingga kegiatan dalam Dinas Pertanian Kota Kediri berjalan dengan lancar dan terkendali. Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri telah melakukan pengawasan (control) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses pengawasan tersebut. Melalui pengawasan tersebut Kepala Dinas Pertanian Kota kediri dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian telah

menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus diperbaiki.

Hal tersebut sesuai dengan Simbolon (2004:61) menurutnya pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- Rencana (planning) yang harus ditentukan.
- Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance).
- Tujuan
- Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa fungsi dari pengawasan yaitu:

- Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pegawai yang diberi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Mendidik para pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

- Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

2) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kota Kediri

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap kegiatan pembangunan pertanian di Kota Kediri seperti Pengawasan pembangunan fisik, pengawasan penggunaan pupuk, Pengawasan penggunaan pestisida, pengecekan pupuk, pengawasan hama penyakit tanaman, pengecekan harga, pengawasan dan evaluasi kegiatan usaha tani, dan pemantauan penggunaan anggaran tiap tahun telah di lakukan dengan baik dan efisien. Pengawasan yang dilakukan sudah memenuhi standarisasi bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat penting untuk menghindari kesalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian pada tahap-tahap berikutnya yang akan berdampak atau berkonsekuensi terhadap aspek waktu dan biaya.

Kegiatan pengawasan pembangunan pertanian bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya, mengetahui tingkat kemajuan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan, memastikan

penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, menyediakan umpan balik dari seluruh *stakeholders* dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan pertanian dan mengukur pencapaian dampak kegiatan pembangunan pertanian sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 2014, pengawasan dan evaluasi merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban dari suatu penyelenggaraan kegiatan satuan kerja Dinas Pertanian, terutama mengenai bagaimana penggunaan dan pencapaian sasaran kinerjanya. Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian diarahkan untuk kegiatan pencatatan secara sistematis, analisa berkala dan kontinyu.

2. Pembangunan Pertanian Berbasis Green Economy di Kota Kediri

a) Penggunaan energi yang ramah lingkungan melalui sistem pertanian organik

Pertanian organik yang semakin berkembang belakangan ini menunjukkan adanya kesadaran petani dan berbagai pihak yang bergelut dalam sektor pertanian akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Revolusi hijau dengan input bahan kimia memberi bukti bahwa lingkungan pertanian menjadi hancur dan tidak lestari. Pertanian organik kemudian dipercaya menjadi salah satu solusi

alternatifnya. Pengembangan pertanian organik di Kota Kediri secara teknis telah disesuaikan dengan prinsip dasar lokalitas. Artinya pengembangan pertanian organik di Kota Kediri harus disesuaikan dengan daya adaptasi tumbuh tanaman/binatang terhadap kondisi lahan, pengetahuan lokal teknis perawatannya, sumber daya pendukung, manfaat sosial tanaman/ binatang bagi komunitas. Pertanian organik memandang alam secara menyeluruh, komponennya saling bergantung dan menghidupi, dan manusia adalah bagian di dalamnya. Prinsip ekologi dalam pertanian organik didasarkan pada hubungan antara organisme dengan alam sekitarnya dan antarorganisme itu sendiri secara seimbang. Pola hubungan antara organisme dan alamnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sekaligus sebagai pedoman atau hukum dasar dalam pengelolaan alam, termasuk pertanian.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian Kota Kediri menerapkan dan mensosialisasikan sistem pertanian organik kepada petani dengan memperhatikan kondisi lingkungan, mengembangkan metode budidaya serta pengolahan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dinas Pertanian Kota Kediri juga menerapkan sistem pertanian organik berdasarkan atas interaksi tanah, tanaman, hewan, manusia, mikroorganisme, ekosistem, dan lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan dan keanekaragaman hayati. Sistem ini secara langsung diarahkan pada usaha meningkatkan proses daur ulang

alami daripada usaha merusak ekosistem pertanian (agroekosistem). Pertanian organik banyak memberikan kontribusi pada perlindungan lingkungan dan masa depan kehidupan manusia. Pertanian organik juga menjamin keberlanjutan bagi agroekosistem dan kehidupan petani sebagai pelaku pertanian. Sumber daya lokal dipergunakan sedemikian rupa sehingga unsur hara, biomassa, dan energi bisa ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah pencemaran.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2013 dan ditetapkan mulai diberlakukan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Tujuan dari Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Pertanian Organik adalah:

- Mengatur pengawasan organik Indonesia;
- Memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- Memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik;
- Membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
- Memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

b) Pencegahan pencemaran lingkungan akibat proses produksi pertanian

Kediri Dinas Pertanian Kota sering kali telah mensosialisasikan dapak yang timbul akibat penggunaan pestisida yang berlebihan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan pestisida di bidang pertanian, mulai dari tahap pembenihan hingga hasil pertanian merupakan suatu hal yang sangat sulit dihindari. Penggunaan pestisida di bidang pertanian haruslah bijaksana dan tepat, mengingat konsumen akhir dari produk pertanian adalah manusia. Selain dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia, penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan dan merusak keseimbangan ekosistem secara luas, yang pada akhirnya akan berdampak secara tidak langsung pada kelangsungan kehidupan manusia.

Pencemaran oleh pestisida dapat dicegah dengan berbagai cara antara lain dengan pengelolaan dan penggunaan pestisida yang benar dan aman, pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pestisida dan terutama bagi sektor pertanian. Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida dan herbisida untuk membasmi hama tanaman, hewan, dan gulma (tanaman benalu) yang bisa mengganggu produksi pertanian sering menimbulkan komplikasi lingkungan. Penekanan

populasi insekta hama tanaman dengan menggunakan insektisida, juga akan mempengaruhi predator dan parasitnya, termasuk serangga lainnya yang memangsa spesies hama dapat ikut terbunuh.

Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Hal tersebut sesuai dengan Supardi (1994), ada beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida dalam bidang pertanian, yang tidak sesuai dengan aturan, yaitu:

- Pencemaran air dan tanah

Di lingkungan perairan, pencemaran air oleh pestisida terutama terjadi melalui aliran air dari tempat kegiatan manusia yang menggunakan pestisida dalam usaha mena ikkan produksi pertanian dan peternakan. Jenis-jenis pestisida yang persisten (DDT, Aldrin, Dieldrin) tidak mengalami degradasi dalam tanah, tapi malah akan berakumulasi. Dalam air, pestisida dapat mengakibatkan biology magnification, pada pestisida yang persisten dapat mencapai komponen terakhir, yaitu manusia melalui rantai makanan. Pestisida dengan formulasi granula, mengalami proses dalam tanah dan air sehingga ada kemungkinan untuk dapat mencemari tanah dan air.

- Pencemaran udara

Pestisida yang disemprotkan akan bercampur dengan udara dan langsung terkena sinar matahari. Pestisida dapat mengalami fotodekomposisi di udara. Pestisida mengalami perkolasi atau ikut terbang menurut aliran angin. Makin halus butiran larutan makin besar kemungkinan ikut perkolasi dan makin jauh ikut diterbangkan arus angin.

- Timbulnya spesies hama yang resisten
 - Spesies hama yang akan diberantas dapat menjadi toleran terhadap pestisida, sehingga populasinya menjadi tidak terkendali. Ini berarti bahwa jumlah individu yang mati sedikit sekali atau tidak ada yang mati, meskipun telah disemprot dengan pestisida dosis normal atau dosis lebih tinggi sekalipun. Populasi dari spesies hama dapat pulih kembali dengan cepat dari pengaruh racun pestisida serta bisa menimbulkan tingkat resistensi pestisida tertentu pada populasi baru yang lebih tinggi, hal ini biasanya disebabkan oleh pestisida golongan *organoklorin*.
- Penggunaan pestisida yang ditujukan untuk memberantas jenis hama tertentu, bahkan dapat menyebabkan munculnya jenis hama yang lain. Ledakan hama sekunder tersebut dapat terjadi beberapa saat setelah penggunaan pestisida, atau pada akhir musim
- Dampak terhadap kesehatan masyarakat

Penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan manusia, misalnya: (a) terdapat residu pestisida pada produk pertanian; (b) bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui rantai makanan. Manusia sebagai makhluk hidup yang letaknya paling ujung dari rantai makanan dapat memperoleh efek biomagnifikasi yang paling besar. Dampak ini ditimbulkan oleh pestisida golongan organoklorin; (c) keracunan pestisida, yang sering terjadi pada pekerja yang menggunakan pestisida berlebihan terhadap pertanian.

c) Mendorong pertumbuhan dan kualitas pertanian

Peningkatan pertumbuhan dan kualitas pertanian Dinas Pertanian Kota Kediri ditujukan untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah dan pendapatan. Peningkatan kualitas pertanian terkait erat dengan keamanan pangan karena kesadaran dan tuntutan masyarakat (konsumen) terhadap keamanan produk yang dikonsumsi semakin tinggi, oleh karena itu peningkatan kualitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya peningkatan produksi. Upaya peningkatan kualitas pertanian sejalan dengan program peningkatan produk bermutu dan berdaya saing mengacu pada Sistem Sertifikasi Pertanian Indonesia (SI SAKTI) dengan pelabelan untuk proses dan produk yang dihasilkan yang diberi label PRIMA, yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu Prima III, Prima II, dan Prima I, sedangkan di daerah (propinsi) didukung dengan pembentukan lembaga Otoritas

Kompeten (*Competent Authority*) yang bertugas untuk memberikan penilaian dan sertifikasi lahan dan produk bermutu yang dihasilkan. Oleh karena itu peningkatan mutu produk hortikultura harus dimulai secara integratif, sejak pemilihan varietas, benih bersertifikat, sampai dengan pemasarannya dengan penerapan sistem jaminan mutu mengacu *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*. Disamping itu untuk produk ekspor hortikultura kandungan residu pestisida tidak boleh melampaui *Maximum Residue Limit (MRL)* dan harus memenuhi persyaratan *Sanitary and Phytosanitary (SPS) compliances*.

Salah satu aspek yang dapat mendukung meningkatnya pertumbuhan dan kualitas mutu pertanian adalah aspek perlindungan tanaman hortikultura. Pengendalian hama terpadu (PHT) adalah suatu cara pengendalian yang memadukan beberapa cara pengendalian yang lebih diarahkan pada cara yang berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek, yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan teknis. Pengendalian Hama Terpadu diarahkan pada pencapaian penerapan prinsip SPS (sanitary and phytosanitary) dan memenuhi ketentuan MRL (maximum residue limit). Pengendalian hama terpadu juga diarahkan untuk mengadopsi perkembangan ilmu teknologi di bidang penggunaan biopestisida dan agensia hayati yang akan menghasilkan produk aman konsumsi dan ramah lingkungan (environmental friendly).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pertanian Berbasis *Green Economy* (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Kediri) maka dapat disimpulkan:

- Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kota Kediri yaitu:
 - a) Bentuk pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian terbagi menjadi dua variabel yaitu, yang pertama pembinaan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri terdiri dari pembinaan keteladanan, kedisiplinan, serta pendidikan dan latihan. Kedua, pembinaan Dinas Pertanian Kota Kediri kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani dengan tujuan memperkuat kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan.
 - b) Kordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian dari data dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa koordinasi yang di lakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri, aparat Dinas Pertanian Kota Kediri dengan gabungan kelompok tani dan petani sudah efektif dan bahkan mudah di

BRAWIJAYA

lakukan. Terlihat adanya hubungan kerja antara pihak kecamatan yang selalu melakukan rapat-rapat kerja, rapat koordinasi, rapat evaluasi, konsultasi, serta penyampaian-penyampaian mengenai proses kegiatan pembangunan. Informan menilai koordinasi dengan Dinas Pertanian memang sangat di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran tentang pentingnya sebuah koordinasi.

c) Fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian pemerintah terbagi menjadi dua variabel, yaitu yang pertama fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri kepada aparat Dinas Pertanian Kota Kediri berupa honorarium petugas yang terkait dengan operasional satuan kerja, pengadaan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan-laporan dalam berbagai bentuk formulir pelaporan, biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan kendaraan dinas. aparat Dinas Pertanian Kediri memang sangat difasilitasi demi kemudahan-kemudahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya jadi mereka tidak akan mangkir dengan alasan tidak adanya fasilitasi dari Dinas Pertanian Kota Kediri. Yang kedua, fasilitasi Dinas Pertanian Kota Kediri dalam pelayanan kepada petani dan gabungan kelompok tani, hal ini diwujudkan dengan pemberian bantuan alat berat dan pemberian informasi-informasi terbaru terkait pertanian.

d) Pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pertanian terbagi menjadi dua variabel. Yang pertama yaitu pengawasan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap aparat Dinas Pertanian Kota Kediri dinilai sudah efektif dengan tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja aparat Dinas Pertanian Kota Kediri. Yang kedua, pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian. Bentuk dari pengawasan tersebut yaitu pengawasan penggunaan bahan-bahan dalam produksi pertanian.

2. Pembangunan pertanian berbasis Green Economy

- a) Penggunaan energi yang ramah lingkungan dalam pembangunan pertanian melalui sistem pertanian organik di Kota Kediri diterapkan berdasarkan atas interaksi tanah, tanaman, hewan, manusia, mikroorganisme, ekosistem, dan lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan dan keanekaragaman hayati. Sistem ini secara langsung diarahkan pada usaha meningkatkan proses daur ulang alami daripada usaha merusak ekosistem pertanian (agroekosistem).
- b) Pencegahan pencemaran lingkungan akibat proses produksi pertanian di Kota Kediri sebagian besar pencemaran lingkungan diciptakan dari penggunaan pestisida. penggunaan pestisida di bidang pertanian yang merupakan salah satu upaya untuk peningkatan produk pertanian ini tidak akan menimbulkan masalah apabila sesuai dengan aturan yang diperbolehkan. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan

yang berlaku dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c) Dalam mendorong pertumbuhan dan kualitas pertanian salah satu aspek yang dapat mendukung meningkatnya pertumbuhan dan kualitas mutu pertanian adalah aspek perlindungan tanaman hortikultura. Pengendalian hama terpadu (PHT) adalah suatu cara pengendalian yang memadukan beberapa cara pengendalian yang lebih diarahkan pada cara yang berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek, yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan teknis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dari beberapa wawancara dan observasi yang dilakukan, ada beberapa saran yang nantinya dapat menjadi sebuah rekomendasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis *green economy* di Kota Kediri, yaitu sebagai berikut:

- a) Bentuk sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani sebaiknya perlu ditingkatkan, sehingga petani tidak akan meragukan apabila ada inovasi/teknologi baru
- b) Untuk unit pelaksana teknis dinas sebaiknya meningkatkan koordinasinya dengan petani sehingga tidak ada kesalahpahaman ataupun perbedaan presepsi di setiap program kegiatan

- c) Mengenai fasilitas yang diberikan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani sebaiknya Dinas Pertanian Kota Kediri memberikan bantuan dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga petani tidak merasa dipersulit dalam peminjaman alat-alat berat pertanian.
- d) Aparat Dinas Pertanian Kota Kediri sebaiknya lebih tegas dalam mengawasi setiap penggunaan pestisida pada tanaman agar tidak merusak keberlangsungan ekosistem dengan mengacu pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida.
- e) Sebaiknya Dinas Pertanian Kota Kediri lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan pertanian yang berbasis green economy melalui sistem pertanian organik. Karena pertanian organik menjamin keberlanjutan bagi agroekosistem dan kehidupan petani sebagai pelaku pertanian.
- f) Untuk masyarakat khususnya petani, seharusnya selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam proses pembangunan.
- g) Untuk masyarakat dan khususnya petani sebaiknya dapat lebih menjaga kelestarian alam dalam proses pembangunan pertanian. Karena alam lah tempat dimana kita tinggal dan tempat kita hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- A.T Mosher. 1991. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta: Yasaguna
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budimanta, A. 2011. *EKONOMI HIJAU: Apa yang Perlu Kita Lakukan?*. BAPPENAS: Jakarta
- Bappenas, 2007. Country Natural Resources and Environment Assessment
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Keman S. 2001. *Bahan Ajar Toksikologi Lingkungan*. Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- Koesnadi. 2006. Hukum Tata Lingkungan . Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mubyarto. 1994. Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta: LP3ES
- Omen. 2008. Desentralisasi dan Otonomi. Jakarta: PT. Aksara Baru
- Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014. Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementrian Pertanian 2014
- Supriady, Bratakusumah. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia

- Soekartawi. 2003. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2000. Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Klasik hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Supardi, I. 1994. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung: Alumni
- Suparmoko, M. 2000. Ekonomi Lingkungan. BPFE: Yogyakarta
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Kontemporer. Jakarta: Kencana
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Todaro, MP. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
- UNEP, 2011. Green Economy: Pathway to Ssutainable Development and Poverty Eradication.
- Waldo, Dwight. 1986. *Pengantar Study Public Administration*. Diterjemahkan oleh: Slamet W, Admosoedarmo. Jakarta: PT. Aksara Baru
- Programa Penyuluhan Pertanian Kota Kediri Tahun 2014
- Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Kediri Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 120/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani



INTERVIEW GUIDE

DRAFT WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA KEDIRI

- 1. Bagaimana pembinaan yang bapak lakukan terhadap aparat Dinas Pertanian kota kediri?
- 2. Bagaimana pembinaan Dinas Pertanian terhadap masyarakat (petani)?
- 3. Bagaimana koordinasi bapak dengan aparat Dinas Pertanian Kota Kediri?
- 4. Bagaimana koordinasi Dinas Pertanian sendiri dengan petani dan gapoktan
- 5. Bentuk fasilitasi apa saja yang diberikan kepada aparat Dinas Pertanian?
- 6. Bentuk fasilitasi apa saja yang diberikan Dinas Pertanian dalam pelayanan kepada masyarakat (petani) dan gapoktan?
- 7. Pengawasan apa yang bapak lakukan terhadap kinerja dari aparat Dinas Pertanian?
- 8. Pengawasan apa yang bapak lakuka terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian

DRAFT WAWANCARA UNTUK KOORDINATOR PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

- 1. Bentuk pendidikan/pelatihan (diklat) apa saja yang dilakukan oleh aparat penyuluh sebagai upaya peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab?
- 2. Seberapa sering kegiatan pendidikan/pelatihan (diklat) terhadap aparat penyuluh tersebut dilakukan?
- 3. Bentuk sosialisasi/pembinaan/pelatihan apa saja yang dilakukan oleh aparat penyuluh kepada petani?
- 4. Seberapa sering sosialisasi/pembinaan kepada petani tersebut dilakukan?

- 5. Bentuk koordinasi apa saja yang dilakukan oleh aparat penyuluh pertanian kepada petani sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan suatu program kegiatan?
- 6. Bentuk fasilitasi apa saja yang diberikan kepada unit pelaksana teknis dinas sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab?
- 7. Bentuk fasilitasi dalam hal pelayanan apa saja yang diberikan kepada petani sebagai upaya kemudahan dalam pembangunan di sektor pertanian?
- 8. Bentuk pengawasan apa saja yang dilakukan kepada petani dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian?
- 9. Apa saja program penggunaan energi yang ramah lingkungan dalam pembangunan pertanian yang telah dilakukan/disosialisasikan kepada petani sebagai upaya pengurangan tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari proses pembangunan pertanian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu?
- 10.Strategi apa saja yang dilakukan penyuluh sebagai upaya mendorong pertumbuhan dan kualitas produksi pertanian?

DRAFT WAWANCARA UNTUK PETANI

- 1. Menurut anda bagaimana sosialisasi/pembinaan/pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri kepada petani?
- 2. Seberapa sering sosialisasi/pembinaan kepada petani tersebut dilakukan?
- 3. Menurut anda bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh dinas pertanian kepada petani sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan suatu program kegiatan?
- 4. Menurut anda bagaimana fasilitasi dalam hal pelayanan yang diberikan dinas pertanian kepada petani sebagai upaya kemudahan dalam pembangunan di sektor pertanian?
- 5. Menurut anda bagaimana pengawasan yang dilakukan kepada petani dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian?

6. Menurut anda bagaimana program penggunaan energi yang ramah lingkungan dalam pembangunan pertanian yang telah dilakukan/disosialisasikan oleh dinas pertanian kepada petani sebagai upaya pengurangan tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari proses pembangunan pertanian yang semakin meningkat dari waktu ke

